



© 2020
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
www.kontras.org

kwitangologi

vol. iii

muda muda bersuara



DIJELAZINE DULU.

September 2019 menjadi alarm bagi bangkitnya kembali anak muda—melalui mahasiswa dan pelajar—untuk menyuarakan kondisi dan tuntutan mereka kepada pemerintah atas situasi demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan korupsi yang memburuk. Aksi massa yang berlangsung sejak 23 hingga 30 September selain menjadi sebuah ikon bagi bangkitnya mahasiswa, juga menunjukkan semakin abainya negara atas kondisi yang akan menimpa warga negaranya. Bagaimana tidak, dari 7 (tujuh) tuntutan yang disuarakan, tidak satu pun diwujudkan. Setidaknya sampai zine ini terpublikasikan.

Kumpulnya kembali mahasiswa secara besar-besaran setelah 21 tahun, mengingatkan kembali tentang reformasi 98. Kendati ada beberapa hal yang berbeda, namun yang jelas ada satu hal yang tidak berubah, yakni kekerasan aparat. Berdasarkan data dari Tim Advokasi Reformasi Dikorupsi yang digawangi oleh beberapa NGO di Jakarta, menerima 390 aduan peserta aksi yang mendapatkan kekerasan dari aparat di lapangan. Aksi mahasiswa boleh jadi baru kembali terjadi setelah 21 tahun, namun kekerasan aparat tetap abadi.

Kekerasan aparat juga terlegitimasi beberapa bulan kemudian dengan pengakuan dari dua anggota brimob yang mengaku menjadi penyiram air keras terhadap Novel Baswedan yang kini mata kirinya tidak lagi bisa melihat. Sialnya, tanpa ba-bi-bu, mereka mengaku begitu saja atas alasan personal dan kepolisian tidak melanjutkan penanganannya sampai ke dalang dari kasus Novel.

Nampaknya memang negara sudah hampir kehilangan daya humornya. Kalian bisa melihat seorang menteri membuat ricuh satu negara dan menggeser topik nasional karena kelakuannya. Kalian bisa saja melihatnya saat mengusung kebijakan nyeleneh seperti memberi "cuti" pada koruptor atau di lain waktu kau bisa lihat menteri tersebut berperan ganda dalam dua hari, hari pertama ia menjadi petugas partai, hari berikutnya ia menjadi menteri untuk membahas satu kasus korupsi. Kalian sudah bisa bayangkan jika seorang menteri saja melakukan seperti itu terus-terusan tanpa ada ketegasan dari pimpinannya, maka kalian sudah dapat bayangan kualitas dari pemimpin tersebut.

Atas serangkaian kasus di atas, negara turut andil dalam memperburuk kondisi demokrasi dan situasi hak asasi manusia, bahkan diprediksikan akan semakin memburuk selama beberapa tahun ke depan dengan gejala-gejala yang sudah terlihat belakangan ini. Maka, konsekuensi logis dari buruknya negara dan situasi yang ditimbulkannya menuntut publik untuk lebih giat lagi merongrong atau bahkan menggigit mereka yang melupakan kewajibannya sebagai pejabat negara. Tenaga yang lebih ini dimiliki oleh anak muda, pelajar dan mahasiswa, juga tidak melupakan peran masyarakat sipil untuk bergabung, bersuara, menuntut perubahan dan menjadi bagian dalam memperbaiki kondisi demokrasi dan hak asasi manusia.

Maka dari itu, Zine Kwitangologi vol. 3 ini mengambil tema Muda-Muda Bersuara.

TEMA: Muda-Muda Bersuara

Dijelazine dulu

KontraS XXII

Intermezzo

BEM-BEM-BEM

Anti - Intelektualisme:

Kondisi Normal Baru bagi Kaum Muda Indonesia (?)

Dalem Negeri

*Ditekan luar dalam

*Pindah Ibukota Cuma Bikin Sengsara

*Omnibus Gedebas Gedebus

Masa Lalu Jangan Dibiarkan Berlalu

*Alasan Klasik Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Masa Lalu

*Berkenalan dengan Korban

Melancong ke Luar Negeri

* Greta Thurnberg dan anak SMA/STM di Indonesia

* Kisah Pergerakan Anak Muda di Hong Kong dan Indonesia

Bicara HAM

Baskara Putra

The Popoh

Deugalih

Pojook Hiburan

Review Film

Chord Musik

Resep Aroma

Teka-Teki HAM

Pojok KontraS

daftar isian



KONTRAS

XXII

Demokrasi adalah hasrat yang tak pernah sampai. bisa jadi demokrasi bukan sistem yang ideal, tetapi demokrasi yang paling mungkin untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warga negara. Karena demokrasi, medium-medium untuk menyampaikan suara warga negara tumbuh dari masa ke masa. Namun, juga demokrasi bisa "dikelabui" oleh tangan-tangan yang memanfaatkan "kemungkinan" dari sistem demokrasi untuk mengubahnya menjadi satu kekuasaan yang dinamakan, "oligarki". Dalam menghalau atau mengobati problem tersebut, mandat harus dikembalikan lagi kepada rakyat. Hal inilah yang menjadi salah satu tonggak munculnya KontraS.

KontraS lahir dari upaya mengadvokasi kasus penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi, di situlah KontraS mengambil posisi untuk bersama dengan gerakan perlawanan dan gerakan pro- demokrasi. Dalam upaya mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut KontraS juga membangun strategi untuk memperjuangkan pertanggungjawaban negara bersama-sama kelompok masyarakat sipil lainnya.

Tindakan tersebut dilakukan melalui advokasi negara serta pembangunan penyadaran publik lewat cara-cara kampanye. Strategi utama untuk membangun kerja-kerja tersebut dilakukan bersama aktor-aktor penting perubahan demokrasi di Indonesia, yaitu: para penyintas dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dan kalangan anak muda.

Pada momentum ulang tahun KontraS yang ke-22, kami ingin mengajak teman-teman muda yang tidak terbatas usia untuk kembali terlibat dalam upaya perjuangan terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia. Kami menilai bahwa anak-anak muda adalah aktor potensial pendorong perubahan yang umumnya masih bebas dari berbagai kepentingan.

Anak-anak muda adalah jembatan dari "bahasa berat" advokasi HAM menjadi sebuah cara unik yang menempatkan HAM sebagai persoalan publik yang dihadapi setiap hari. Lahirnya trend media sosial yang semakin berkembang adalah peluang besar bagi upaya penyadaran publik melalui "tangan" anak-anak muda. Kami memahami bahwa "Kewarganegaraan" adalah ide tentang tanggung jawab warganegara lintas politik, lintas komunal. Namun, pada aksi akbar pada September 2019 lalu adalah alarm bagi perwakilan pemuda untuk kembali terlibat dalam upaya merebut ruang dan menempatkan alur demokrasi dan hak asasi manusia dalam koridor yang tepat.

Anak muda ialah nafas yang menjadi tanda bahwa semangat perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia masih ada dan terus berlipat ganda.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]

BEM



BEM



BEM

Menurut anda, dapatkah mahasiswa Indonesia mengadakan gerakan kembali seperti pada bulan September 2019?

Momentum apa yang menurut anda dapat menjadi pemantik gerakan tersebut?

Ilham — Korps Barisan Pemuda Aceh.

1. Tergantung issue dan framing media. Seberapa kuat kita mengkampanyekan isu tersebut baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau di September lalu itu memang semua indikator mendukung mulai dari Simpul tergalang, kondisi sosial politik tidak menentu, psikologis publik terganggu, org kemudian mudah tersulut emosi ditambah kampanye yang sangat masif di media sosial dengan menggunakan #ReformasiDikorupsi disusul #GejayanMemanggil dan di Aceh sendiri ada #SimpangLimaMemanggil.

Tapi, ada hal yang sangat disayangkan pasca aksi. Banyak yang Akar pemahamannya gagal, makanya cuma aksi, selfie, upload instastory trus ya lanjut lagi ke kehidupan biasa. Nah, kita lihat tindak lanjut dari aksi September 2019 itu, ada nggak tuntutan mahasiswa yang terealisasi?

Gerakan sekarang juga sangat patronis, tanpa patron ga ada yg mau gerak penokohan terjadi dalam dan setelah aksi. Apabila setelah aksi individu yang ditokohkan itu melempem, maka aksi juga akan melempem. Kalau kultur penokohan masih dilanjutkan, gerakan apapun akan mati setelah ada nama yang naik.

2. Kita tidak perlu membahas momentum untuk sekarang, banyak sekali kasus yang terjadi saat ini. Saya rasa yang lebih penting sekarang adalah belajar dari pengalaman, Untuk semua, tanpa terkecuali.

kalo demo aja gak cukup utk menangkan tuntutan, harus ada advokasi lanjutan. Advokasi melalui litigasi dan nonlitigasi serta kreatif campaign agar melibatkan banyak pihak. Dimulai dari hal fundamental, kenapa harus melawan. Kalau ini udah clear semua urusan isu-isu itu akan gampang di handle, angkat sendiri ke medsos Hilangkan Patronisasi, ubah mindset berfikir.

Pertama, iyah sangat mungkin terjadi,, gerakan atau gelombang aksi demontsrasi mahasiswa yang besar seperti yang telah terjadi sebelum - sebelumnya tentu saja dapat kembali terjadi nantinya. Tetapi, tentunya untuk terjadinya gerakan besar itu dipengaruhi banyak faktor.

Kedua, terkait momentum yang kemudian berpotensi menjadi pemantik terjadinya gerakan besar mahasiswa kedepan secara umum saya kira tidak akan jauh beda dari sebelumnya. Pertama bahwa gerakan mahasiswa bertujuan untuk bagaimana kemudian membawa bangsa indonesia menjadi lebih baik, atau membawa keluar dari sebuah keterpurukan yang terjadi.

Kedua bahwa gerakan besar tentunya bisa terjadi karena banyak faktor antara lain situasi iklim politik tanah air, pengelolaan opini di media baik itu media sosial urgensi, dll . Pengelolaan opini di publik (harus secara) masif terjadi sehingga secara tidak langsung terbentuklah presepsi yang sama oleh mahasiswa indonesia yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.

Artinya secara umum sebenarnya tidak jauh beda pemantik terjadinya gerakan besar, maka ketika kita coba menganalisis kedepan kemungkinan terjadinya gerakan besar seperti halnya soal omnibuslaw, rencana pemindahan ibu kota, dan beberapa lagi.

Fandi — Ketua BEM Universitas Halu Oleo.

Pertama, probabilitas untuk bergerak seperti september 2019 masih terbuka, dengan tuntutan yang belum selesai pada gerakan #ReformasiDikorupsi. Ditambah ada kebijakan pembuatan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang memantik polemik di berbagai kalangan. Namun, pola gerak mahasiswa akan berbeda dibanding saat 2019, dengan melihat realita bahwa sulit mencapai kompromi dengan pemerintah lewat aksi masa, meski ada martir dan korban yang berjatuhan.

Akan ada gerakan ekstra-parlementer yang dibuat lebih terorganisir dan sustain, untuk menciptakan diskursus publik yang masif, lewat penciptaan opini publik yang heterogen dan dinamis untuk melawan narasi yang diciptakan oleh pemerintah pada konteks Omnibus Law "CILAKA". Dilanjutkan lewat berbagai pola pengorganisasian gerakan, dan penguatan basis argumen. Dan diakhiri dengan simposium nasional untuk menjadi muara gerakan yang mewadahi berbagai spektrum gerakan dan kalangan dengan tujuan membuat rekomendasi yang solid, ilmiah, objektif, dan berpihak, untuk menjadi penyeimbang dari proses legislasi di parlemen yang kehilangan fungsi check & balance, dan dirkursus ide-gagasannya.

Kedua, momentum itu sudah ada, dengan melihat realita bahwa 2 institusi pokok yakni institusi politik & ekonomi yang saling berkelindan dan sama-sama ekstraktif. Dengan kondisi semakin menggeliatnya oligarki politik-ekonomi di Indonesia, bukan lagi perihal momentum, tapi memilih metode gerak dan menciptakan bargaining position yang kuat. Karena produk hukum, kebijakan, dan agenda2 yang dihasilkan dari institusi yang korup akan terus semakin memperburuk situasi dan kondisi ekonomis, sosial, dan lingkungan di Indonesia secara keseluruhan.

**Sulthan — Ketua BEM
Universitas Gadjah Mada**

Iqbal — Presma Universitas Sumatera Utara

1. Sangat mungkin sekali gerakan Mahasiswa Indonesia kembali menghiasi jalanan, sejatinya mahasiswa diuntut untuk terus mengkritik dan bergerak menyikapi persoalan negeri ini. Gerakan yg di bangun pada september 2019 seharusnya menjadi semangat perubahan baru buat indonesia, untuk rakyat dan terkhusus mahasiswa itu sendiri. Jika saja setiap gerakan mahasiswa tidak terpolitisir oleh kepentingan politik mana pun maka gerakan ini akan panjang dan abadi.

2. Bicara momentum dalam gerakan itu sangat reaksioner, karna gerakan itu bicara kajian isu yg di bahas secara jelas dan konsisten. Artinya setiap isu-isu yg sudah dikaji terlebih dahulu bisa saja menjadi pemantik buat gerakan" mahasiswa se-indonesia

**Fajar — Ketua BEM
Universitas Indonesia**

1. Bisa karena tuntutan yang dibawa pada September 2019 belum juga dirampungkan oleh Pemerintah dan DPR, sehingga perlu untuk dikawal kembali tahun ini. Namun, mahasiswa harus mengkonsolidasikan peran satu sama lain sehingga terdapat kesamaan pandangan atas tuntutan dan cara gerak yang hendak dibawa untuk disuarakan bersama. Terlebih, sebenarnya aksi pada september 2019 telah memberikan semangat baru bagi mahasiswa yang juga elemen dari suatu masyarakat bahwa aksi massa masih relevan untuk dilakukan.

2. Momentumnya besar kemungkinan saat omnibus law cipta lapangan kerja atau produk legislasi bermasalah lainnya benar-benar disahkan.

BEM



BEM



BEM



anti-intelektualisme:

Kondisi Normal Baru bagi Kaum Muda Indonesia (?)

oleh: Daywin Prayogo

Saya diminta menyampaikan beberapa hal dalam pembukaan ini; soal bagaimana perjalanan sejarah yang melandasi gerakan anak muda saat ini, dan apa penting dan relevan gerakan muda saat ini dengan perjuangan isu - isu kemanusiaan, khususnya di Indonesia.

Selain cukup membingungkan, saya merasa tidak punya pengetahuan untuk menjelaskan keterikatan sejarah antara perjuangan muda di masa lalu serta wewenang ilmiah atas relevansi dan pentingnya anak muda hari ini. Saya juga bukan pengamat sejarah, pun saya juga tidak percaya diri disebut muda.

Namun izinkan saya menyampaikan pandangan saya tentang epidemi yang tengah dialami hampir kebanyakan dari kita semua. Tak hanya di perjuangan kemanusiaan; ia tengah menjangkiti kehidupan civitas academica, utas - utas di laman media sosial, ruang - ruang diskusi, grup WA keluarga dan segala macam ruang yang mengandalkan 'bacot' sebagai senjata.

'Jangan hanya bisa kritik, kasih solusi dong!'

'Ah SJW lu! Bacot An^!#@!'

Bak kualitas udara Jakarta hari ini; ruang perdebatan, dimanapun ia berada terus pekat dengan unsur polutan semacam pesan - pesan diatas. Ngebul, sesak dan perih mata; yang tidak ada faedahnya untuk badan, juga bagi pemikiran.

Perkenalkan; ialah semangat anti - intelektual.

Tuduhan - tuduhan digelorakan, sentimen didorong terus ke permukaan; menyesakkan kita yang menaruh harap pada kebebasan sebagai landasan prinsip atas tindakan - tindakan kita.

Tak peduli berapa buku yang kamu baca, dan berapa banyak pertanyaan yang kita lempar; keberadaan kita hanyalah diukur oleh kemana arah sentimen publik bermuara. Diluar itu; anda hanyalah seorang poser pengeluh yang tak tahu untung dirugi.

Kondisi ini diafirmasi oleh banyak dari kawan - kawan yang bekerja di isu kemanusiaan sebagai sebuah hambatan; yang biasanya bekerja membangun relasi kritis dengan otoritas/pemerintah. Kini mereka juga dibebani oleh sikap anti - intelektualisme dari para pendukung figur politik yang senang tampil sederhana, dan menyajikan politik sebagai panggung menuju ketenaran - ketimbang sebagai sebuah ritus demokrasi yang membuka seluas - luasnya keran warga untuk turut mengisi, mengurangi dan membentuk politik dan demokrasi kita.

Kiranya universalisme, kebebasan, kesetaraan serta kemanusiaan sebagai prinsip telah bergeser dalam momen - momen tersebut; kepada siapa figur panutan yang paling bisa kita percaya. Kita hanya mau melihat kebenaran, seluas kornea mata mengizinkan - skotomisasi atas kebenaran inilah yang jadi persoalan bagi kita hari - hari ini.

Saya berpikir maka saya ada, telah diganti dengan falsafah 'Saya percaya maka saya benar'.

Walhasil semangat anti - intelektual hadir sebagai pembunuh bagi kritisisme, semangat kesetaraan, penindas para pejuang keadilan dan perlahan merasuki kita untuk membangun sebuah (kondisi) 'normal baru'; bahwa pertentangan dan kontradiksi adalah sebuah kesia - siaan belaka. Belum lagi para penganut kebebasan terus dihipit dengan ancaman pembatasan ekspresi, ancaman skorsing bagi yang masih berkuliah atau bahkan kriminalisasi jika dianggap kebablasan dan tak berkenan di hati penguasa.

Sikap anti - kritik; yang menurut Soe Hok Gie seharusnya masuk tempat sampah itu, toh tak mereda setelah tahun - tahun politik berlalu. Semangat anti - intelektualisme justru terus ada dan kini berlipat ganda. Dan bahayanya juga turut menjangkiti para pejuang - pejuang kemanusiaan itu sendiri; atau dalam makna peyoratif - para intelektual berplat merah. Tak hanya sekedar memerangi koleganya sendiri; ia tampil sebagai oponent dari demokrasi dan kebebasan yang kerap ia khotbahkan dalam setiap kesempatan.

Tidak ada harapan yang tumbuh dari dalil dan tindakan tersebut. Hanyalah kelabu; awan gelap yang menutupi sebuah pertunjukkan kebanalan dari gerakan masyarakat sipil Indonesia dalam memahami demokrasi dan kebebasan itu sendiri.

Melawan 'kultur' semacam ini mau tak mau membutuhkan upaya yang lebih. Bukan, bukan dengan membubuhkan gelar semata di belakang nama untuk mendapat cap sebagai golongan terdidik. Memang masih ada yang menaruh kritik pada kata intelektual sendiri; bahwa ia selalu memasang jarak, atau dikenal dengan orang yang memiliki keahlian khusus di dalam suatu bidang (expert).

Namun ketika diperhadapkan dengan semangat anti - kritik, dan kontra - kebebasan; perlu bagi kita untuk merumuskan apa itu intelektualisme bagi kita bersama. Mungkin sebagai inspirasi untuk melawan anti - intelektualisme, saya ingin mengutip seorang kawan yang belum lama pergi; jadilah seorang warga negara yang aktif dan peduli pada kemaslahatan bersama - tak lain dan tak bukan dengan terus menuangkan pemikiran dan ide kita atas persoalan kemanusiaan, dan mengedarkannya di ruang - ruang publik yang ada.

Karena kebebasan tidak hanya dimaknai sebagai hak yang melekat sejak kita lahir, tapi ia mewujudkan dalam tindakan dan sejauh mana kita bersedia diuji atas tindakan - tindakan kita.

'Pendukung calon yang sana ya? Pantes kritik pemerintah terus!'

'Kok sharenya berita negatif terus sih?'

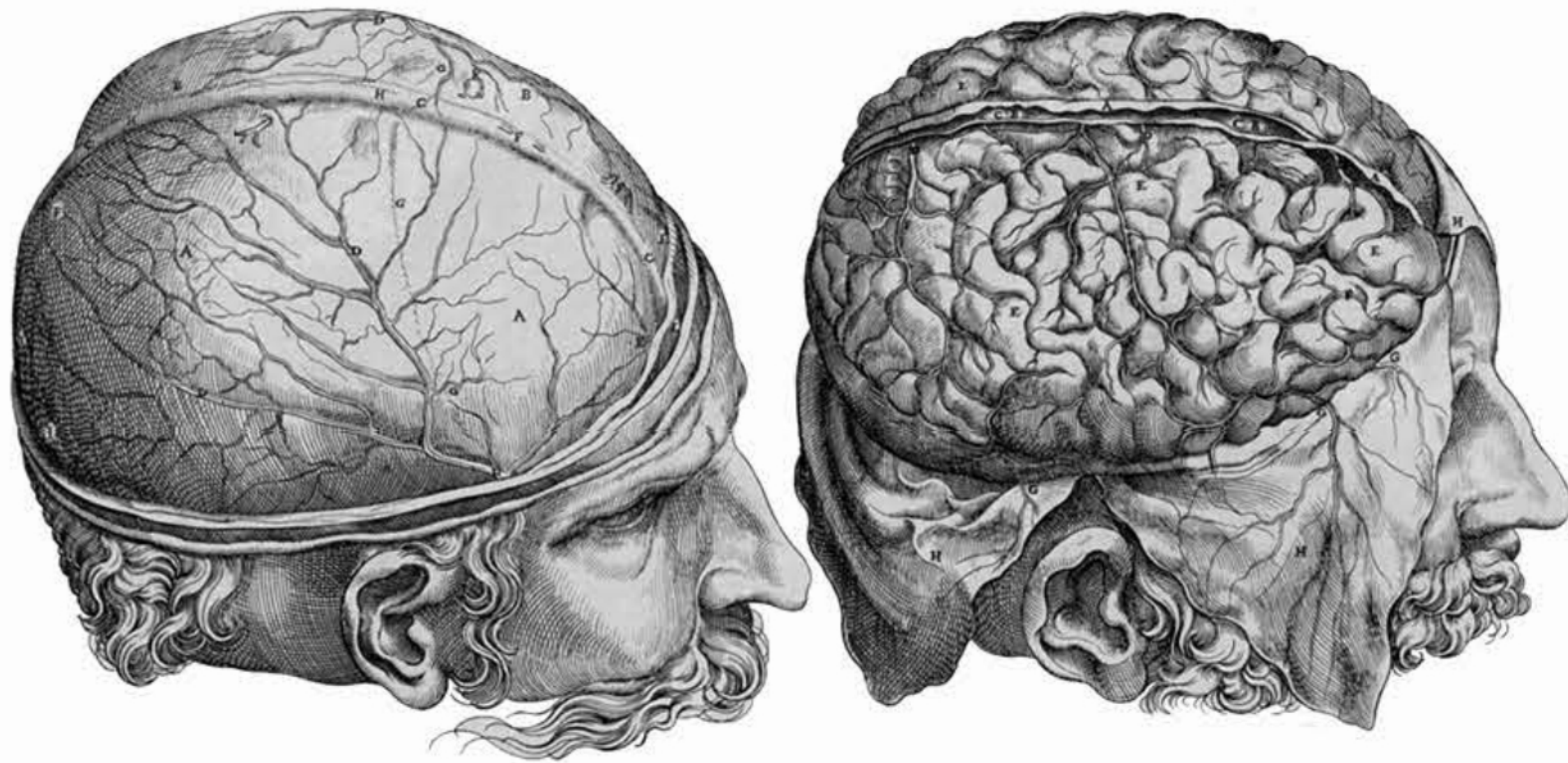
'alah, poser lo!'

“ DITEKAN LUAR DALAM ↙

apes nian nasib warga +62

ada mulut, ada telinga, ada pikiran,

tapi tidak bisa bersuara.



sedikit saja
mengeluarkan kata
kata,

”

langsung dipopor
senjata.



Kebebasan berkumpul di Indonesia ini jadi masalah banget nih belakangan di Indonesia setelah tiga aksi besar, May Day, 21-23 Mei 2019, dan 23-30 September 2019 mendapat represivitas dari aparat yang tidak kira-kira. masing-masing aksi tersebut menimbulkan korban, baik yang luka maupun tewas. isu kebebasan berkumpul rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan karena peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul pasca reformasi cenderung berulang seperti prareformasi.

Padahal, kebebasan berkumpul tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan demonstrasi atau pawai besar menyusuri jalan terbesar di ibukota yang dipimpin oleh seorang aktivis. Kebebasan berkumpul merupakan sarana penting karena melalui kebebasan tersebut publik dapat mengekspresikan pandangan mereka kepada siapapun, seperti kebijakan negara atau pejabat publik. Kebebasan berkumpul mendukung terwujudnya keragaman publik dan salah satu alat yang tepat untuk mencapai perubahan dalam masyarakat.

Jangan sampai ke depan ada komunitas skateboard atau pecinta boba yang lagi kumpul dibubarin sama polisi. Itu mungkin banget kejadian, sih. Siapa tau, komunitas pecinta boba tidak disukai pemerintah karena bikin diabetes. Atas alasan tersebut, ketika anggota komunitas pecinta boba lagi nyedot bareng-bareng di taman menteng, pasukan huru hara turun bubarin mereka. Kebayang deh mereka yang lagi asik-asik nyedot, disuruh bubar. Sudah disuruh bubar, dipukulin juga lagi.

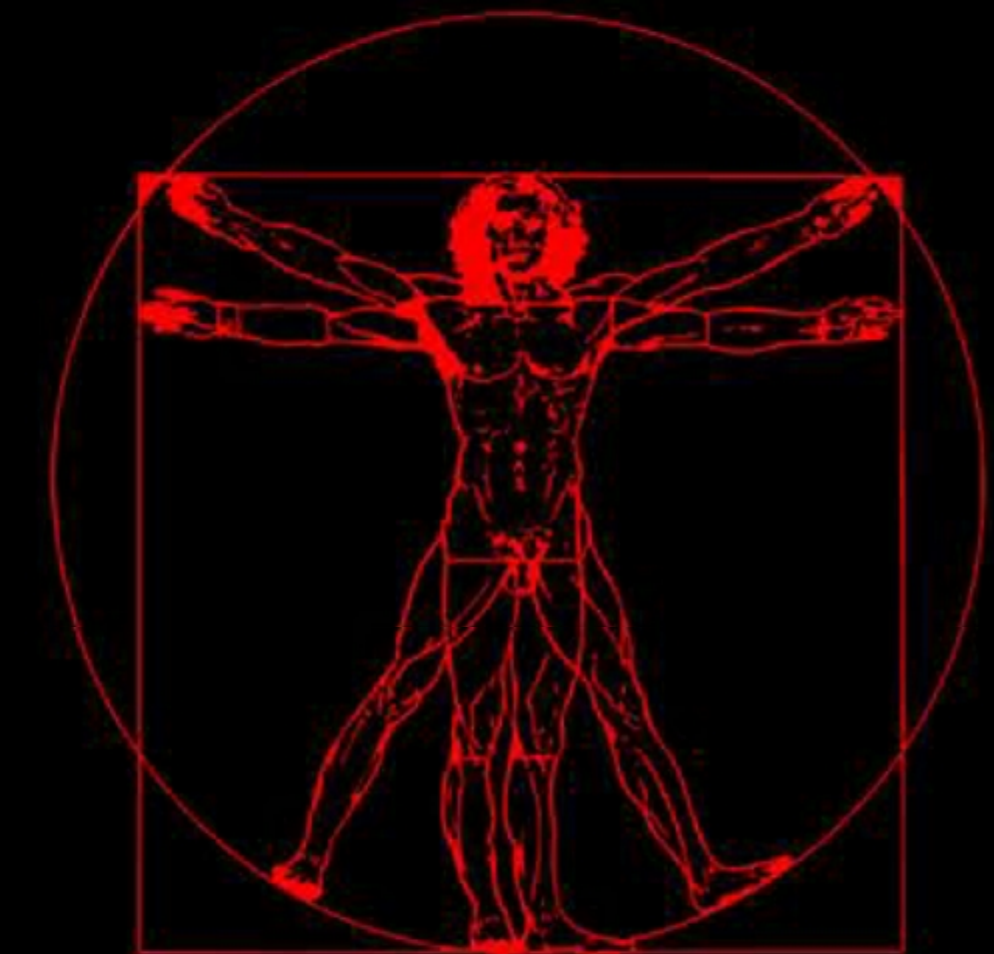
Ancaman terhadap warga negara 62 juga tidak cuma pas kumpul-kumpul di lapangan, tapi kumpul-kumpul di dunia maya bisa jadi masalah juga. Tidak sedikit dari warga yang karena kritik dan suaranya di dunia maya langsung didatengin bapak-bapak baju coklat. Sialnya, terkadang peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul ini diikuti juga oleh ormas-ormas. Mereka, dalam tindakannya, bahkan bisa bertindak seperti polisi yang bisa menindak orang lain.

Terhitung sejak 2015 hingga 2018, KontraS mendokumentasikan 1.056 peristiwa dari seluruh provinsi di negara 62 yang menyangkut berkumpul berkumpul secara damai. Dengan menggunakan pemantauan media, KontraS memantau peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, termasuk hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi selama empat tahun terakhir (2015-2018). KontraS menyadari angka itu merupakan angka yang terdokumentasi. Terbuka peluang untuk kurang atau bahkan secara hipotesis: melebihi yang tercatat (dark number). Secara umum, bentuk pelanggaran yang terjadi adalah pembubaran secara paksa yang juga diiringi dengan tindakan lain seperti pelarangan, intimidasi dan penggunaan kekerasan. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi penggunaan kewenangan-kewenangan koersif negara seperti penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian.

Dari laporan tersebut, KontraS menemukan bahwa pola pembatasan kebebasan berkumpul muncul dari beberapa hal, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang membuka tafsir secara luas bagi aparat keamanan di lapangan untuk dilaksanakan (perilaku) secara serampangan untuk membatasi hak atas kebebasan berkumpul dan kebebasan fundamental lainnya, minimnya pemahaman pemerintah dan aparat kepolisian terkait standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi maupun konvensi atau perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, konstruksi negara melalui aparaturnya dalam menanggapi beberapa isu sensitif dijadikan landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang menyimpang dari kewajibannya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara, bentuk dan metode pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul tidak hanya melalui pembubaran yang dilakukan atas intervensi dari organisasi kemasyarakatan (ORMAS).

Aksi-aksi besar yang terjadi pada 2019 dan respon aparat negara dalam menangani aksi tersebut singkat cerita bisa dibilang publik ditekan luar dan dalam. Ya, di luar (lapangan) kita bisa terancam dipukul, di dalam (maya) kita bisa dipolisikan karena kritik. Ke depan prediksi KontraS polisi akan lebih kencang lagi terhadap mereka yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

Tapi ya, ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai warga negara yang mana kondisi negara sedang kacau-kacunya. Aksi 23-30 September 2019 jadi salah satu alarm bagi mahasiswa dan publik untuk kembali bangkit. Semoga dengan segala bentuk ancaman dan peristiwa yang terjadi, publik masih siap untuk berkumpul dan melawan.



PINDAH IBUKOTA, CUMA BIKIN SENGSARA!



Menjelang sidang sengketa Mahkamah Konstitusi atas hasil Pemilu, Pak Jokowi melontarkan ide tegas terkait dengan pemindahan ibukota negara. Setelah itu, dalam pidato-pidatonya ia hampir selalu menyinggung mengenai pemindahan ibukota negara. Ibukota negara, berikutnya, akan ditempatkan pada wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang luasnya mencapai 180.965 hektar. Jelas, pembangunan ibukota negara bukanlah selayaknya pembangunan RT yang hanya memperbaiki tempat pembuangan sampah, selokan, atau gorong-gorong.

Tidak main-main, ibukota negara ini kelak akan dibangun megaprojek yang disebut sebagai Rimba Nusa. Kelak, kawasan Ibu Kota Negara (IKN) bakalan dibagi menjadi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42.000 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara. Sementara, luasan daerah tersebut kini bentuknya hutan.

Bomeo, dalam catatan CIFOR, antara tahun 2000 dan 2017 ditemukan 6,04 juta hektar hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14%. Sekitar setengah dari daerah itu akhirnya dikonversi menjadi perkebunan industri, dan 92% dari hutan yang dikonversi diganti dengan perkebunan dalam jangka waktu satu tahun setelah ditebangi. Dengan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan, semakin menegaskan penelitian WWF yang mengatakan bahwa hutan di Kalimantan akan kehilangan 75% hutan pada tahun 2020. Sebab, selama laju penduduk semakin tinggi, lahan akan terus beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal maupun industri.

Pemindahan ibukota ini, berdasarkan penelitian dari koalisi masyarakat sipil, hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. sedikitnya terdapat 55 perusahaan yang teridentifikasi akan diuntungkan karena kepemilikan tambang batu bara, sawit, kayu, dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara serta pengusaha properti. Lebih dari itu, proyek besar ini diduga kuat akan menjadi jalan pemutihan atau cuci dosa perusahaan atas perusakan lingkungan yang telah dilakukan di tanah Kalimantan Timur. Sejak awal, korporasi punya kesempatan sejak dini untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan rencana hadirnya mega proyek Ibu Kota Negara.

Sementara, biodiversitas yang ada di wilayah Kalimantan, mulai dari Orang Utan, Bekantan, Pesut, Hutan, sampai dengan masyarakat adat di Kalimantan akan terancam punah akibat gentrifikasi atas proyek ibukota baru. Geliat negara mempertentangkan pembangunan dan lingkungan hidup semakin menjadi-jadi dengan proyek ini. Agaknya, kita baru akan belajar tentang lingkungan hidup sampai alam kita benar-benar rusak. Selama masih bisa digunakan, kita akan terus menghabisinya sampai memenuhi kepuasan homo sapiens—yang sebetulnya tidak akan pernah selesai.



OMNIBUS



~ GEDEBAS - GEDEBUS ~

Sebelum disebut dalam pidato pelantikan Joko Widodo – Ma'ruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2019, wacana mengenai pembentukan Omnibus Law sudah pernah dicetuskan oleh Sofjan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2016. Omnibus Law yang dimaksud oleh baik Jokowi pada tahun 2019 maupun Sofjan Djalil pada tahun 2016 dimaknai secara mirip, yakni upaya untuk merevisi ketentuan sektor tertentu yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang secara sekaligus. Konteks perumusan Omnibus Law keduanya pun serupa, yakni untuk memuluskan investasi yang masuk ke Indonesia dengan cara memudahkan berbagai perizinan dan persyaratan yang terdapat dalam berbagai UU.

Semenjak dicetuskan dalam pidato pelantikan presiden pada Oktober 2019, mulai terlihat upaya yang serius dari pemerintah dalam merumuskan Omnibus Law yang kemudian dibagi menjadi empat sektor yakni Cipta Kerja, Kefarmasian, Perpajakan, dan Ibu kota. Tidak cukup hanya perspektif pembuatannya yang terpaku pada kemudahan berinvestasi yang berpotensi melemahkan upaya perlindungan lingkungan dan hak warga negara, ternyata proses perumusan Omnibus Law oleh pemerintah dilakukan dengan sangat tertutup, atau setidaknya tertutup terhadap kelompok paling rentan yakni buruh dan masyarakat sipil lainnya dan terbuka terhadap kelompok pemodal.

Hal ini diperlihatkan secara gamblang dengan dilibatkannya berbagai asosiasi pengusaha dengan diberi kesempatan untuk memberikan rekomendasi serta turut mensosialisasikan Omnibus Law Cipta Kerja kepada masyarakat. Mengatur hajat hidup orang banyak kok ngumpet-ngumpet?

SEPTEMBER
15
2016

Sofyan Djalil, seminar nasional "Membangun Optimisme Investasi Kehutanan di Tengah Perlambatan Ekonomi", Jakarta, ide omnibus law ini sesuai dengan visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menghendaki deregulasi peraturan-peraturan yang membebani dunia usaha. Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dirilis belasan jilid adalah langkah merevisi peraturan-peraturan yang levelnya di bawah UU.

Sofyan Jalil: "Dengan omnibus law, memperbaiki sekian banyak UU. Yang tadinya harus tiga hari, sekarang maksimum sehari,"

SEPTEMBER
18
2017

Menteri Agraria dan Tata Ruang: Sofyan Djalil berjanji akan memangkas perizinan di sektor properti. Caranya, adalah dengan membuat omnibus law untuk menyelesaikan puluhan Undang-undang yang menghambat investasi. Langkah tersebut diharapkan bisa menarik investor masuk ke Tanah Air.

Darmin Nasution: "Dalam satu dua minggu ini akan diminta dibekukan dulu semua (perizinan). Kalau disebut (diatur, red) di UU, kami sudah identifikasi ada sepuluh sampai sebelas UU yang memuat perizinan. Itu akan dibuat omnibus law, satu UU mengamandemen sebelas UU itu,"

OKTOBER
20
2019

Jokowi dalam Pidato Pelantikan Presiden-Wapres: Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Pelaku usaha akan membentuk gugus tugas (task force) yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Nantinya, tim akan bertugas untuk mengkaji dan memberikan masukan bagi penyatuan sejumlah aturan (omnibus law). Hal tersebut disepakati, usai perwakilan Kadin mengadakan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (22/11).

FEBRUARI
16
2017

MARET
28
2018

NOVEMBER
22
2019

Kemko Perekonomian: Satgas yang diisi oleh beragam asosiasi pengusaha, kalangan akademisi, dan pemerintah tersebut dibentuk untuk mengkaji berbagai perubahan undang-undang terkait perpajakan dan lapangan kerja dalam omnibus law.

DESEMBER
17
2019

Airlangga mengatakan proses pembahasan RUU Omnibus Law dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dimulai Januari.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demonstrasi di DPR untuk menolak Omnibus Law & kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Senin (20/1/2020). Menurut mereka, buruh akan menjadi salah satu pihak yang dirugikan jika Omnibus Law disahkan.

JANUARI
22
2020

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai buruh belum memahami isi RUU Omnibus Law sehingga menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR dan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibentuk untuk menghilangkan praktik korupsi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan akan mulai mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada pekan ini. Publikasi ini bersamaan dengan diserahkannya Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

FEBRUARI
13
2020

Tiga serikat buruh merasa namanya dicatut dalam tim pembahas omnibus law Cipta Kerja yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mereka merasa tak dilibatkan dalam pembahasan atau menyetujui pembentukan tim tersebut. Tiga serikat buruh yang sudah menyatakan bahwa nama organisasinya dicatut adalah Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Markas Besar Polri membenarkan terlibat dalam pertemuan tertutup dengan pemerintah dan buruh untuk membahas omnibus law Cipta Kerja pada 14 Januari 2020. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisariss Besar Asep Adi Saputra menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya.

DESEMBER
16
2019

JANUARI
20
2020

JANUARI
28
2020

Masa Lalu, Jangan Dibiarkan Berlalu!

**Kisah Alasan Klasik
Penundaan Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat
Masa Lalu**

Versi Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menyatakan dalam sila kelima-nya, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Bunyi sila tersebut adalah perwujudan nyata bagaimana founding father kita merasa bahwa Indonesia harus memperhatikan dengan sangat pemberian keadilan bagi warga negaranya untuk dapat menjadi besar dan disegani di seantero dunia.

Setidaknya, secara teori, sila kelima adalah bentuk perwujudan ideal sebuah negara yang diramalkan akan menjadi Atlantis baru di masa depan. Namun secara praksis, sila kelima adalah sila yang tidak pernah diejawantahkan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kenapa ia ditaruh dalam posisi yang paling buncit, karena sudah tahu akan sulit untuk diwujudkan hehe.

Bagaimana tidak? Keadilan tidak dirasakan oleh para petani kecil di daerah terpencil yang merentang mulai dari Aceh ke Papua (apalagi Papua, dimana tanahnya dikeruk habis oleh Industri ekstraktif macam tambang dan kelapa sawit hadessss). Keadilan juga adalah kalimat asing bagi para buruh di industri kecil yang rawan akan laku eksploitatif pelaku usaha culas dan licik. Keadilan sudah tentu juga barang tidak terjamah ketika kita bicara warga minoritas, baik itu minoritas agama, gender dan minoritas adat.

Tapi kita tidak akan membahas semua itu. Karena nantinya tulisan ini akan seperti laporan akademis yang memakan ratusan halaman dan pastinya membuat zine ini tidak akan dibaca karena membosankan. Keadilan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang bahkan setelah rentang masa yang panjang tidak kunjung diperhatikan oleh Negara.

Tidak terpenuhinya keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, berarti kita bicara tentang hari ini kemauan negara untuk itu. Kemauan negara mulai semenjak reformasi diwujudkan sampai sekarang Indonesia -yang kata Presiden- lebih bagus dalam menerapkan demokrasi masih belum terlihat hilalnya. Kemauan itu ditunda-tunda terus dengan pelbagai alasan (yang akan kami kurasi untuk kalian menjadi 4 (empat) alasan teratas dari beribu-ribu alasan negara yang cukup bikin tangan gemetar dan kepala spaneng karena gregetan). Top four alasan negara untuk tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah:

1 Belum Cukup Bukti

Alasan ini memuncaki daftar alasan paling klasik dan klise yang disampaikan oleh Pemerintah ketika ditagih untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu setiap tahunnya. Kurangnya alat bukti karena para saksi, korban dan pelaku dipanggil oleh yang maha kuasa juga sebenarnya adalah kesalahan negara juga, kenapa diundur-undur terus penyelesaiannya. Selain itu, kerap kali alasan ini muncul secara prematur, dalam artian belum juga dilakukan penyidikan, eh udah ngomong duluan kalo buktinya belum cukup.

Sudah begitu, setelah selesai ngomong malah menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mon maaf nih, dikiranya nih Pelanggaran HAM yang korbannya masif, efek diskriminasi dari segi sosial, politik dan budaya yang dirasakan korban masih berlangsung dan lebih penting duka kehilangan orang yang disayangi mau diselesaikan dengan jalan bersalam-salaman abis itu selesai? Udah deh, jangan ngadi-ngadi, mending sekarang kita desak Pemerintah untuk nerusin hasil penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan oleh Jaksa Agung, biar nanti bisa dilihat dalam tingkat penyidikan tersebut apakah buktinya memadai atau tidak. Daripada digantungan, ya kan?

Militer Hanya Melaksanakan Kewajiban

2

Ini alasan kedua yang cukup sering terlontar. Kali ini bukan dari pemerintahnya, tapi dari institusi kau tahu siapa. Di banyak negara, institusi ini kerap menjadi pelaku dari pelanggaran HAM, karena memang institusi ini kerap dipakai sebagai alat negara untuk menegakkan keberaturan dan menumpas semua yang berseberangan dengan ide besar negara.

Dalam konteks Indonesia, institusi ini pernah menjadi institusi yang megang Indonesia banget yakni selama kurun waktu 32 tahun orba atau orde baik baru berkuasa. Institusi ini benar-benar dipakai untuk menumpas semua yang menurut negara salah dan harus diluruskan tanpa terlebih dahulu mendorong proses hukum untuk mereka yang dituduh bersalah. Itulah kenapa jika kalian bertanya-tanya, pas zaman reformasi ada tuntutan pencabutan dwifungsi ABRI, karena memang hendak memisahkan kewenangan keamanan dan politis dari institusi ini dan hendak membuat tentara kita menjadi lebih profesional dan bisa diawasi secara lebih baik agar tidak lagi terjadi brutalitas yang memakan korban jiwa ketika melaksanakan kewajibannya nanti.

Mengganggu Stabilitas Politik

3

Alasan ketiga nih. Alasan yang cukup nggak masuk akal. Kenapa? Sesederhana karena stabilitas politik siapa yang terganggu? Stabilitas politik Pak Wir? Atau stabilitas politik Pak Wowo? Kalau benar itu alasannya ya sudah bubarkan saja skena politik sekarang dan digantikan dengan skena musik M-Bloc karena lebih progresif dan banyak ragam acaranya.

Pembangunan Infrastruktur Didahulukan

4

Bagi yang sudah nonton video KontraS react setelah nonton Pak Joko Widodo diwawancara oleh jurnalis BBC pasti udah tahu. Mau tahu? Tonton dulu, nanti pasti lo paham.

berkenalan dengan korban

e
f
f
e
n
d
i



Orang-orang mengenalnya sebagai "Aki Pendi", seorang penyintas 65 yang tidak pernah absen dalam Aksi Kamisan. Tubuhnya yang kurus dengan kulit mengendur, rambut, kumis dan jenggotnya yang sudah memutih, bahkan gigi yang seluruhnya sudah tanggal, tidak mempengaruhi staminanya untuk berjalan kaki ke berbagai tempat. Aki Pendi saat ini berusia 77 tahun. Pada usia yang sudah lanjut, ia masih gemar menulis tentang berbagai hal, mulai dari pengalaman hidup sampai ulasan teori dari tokoh terkenal.

Aki Pendi menjadi korban kejahatan aparat saat umurnya masih belia. Kala itu, Aki Pendi harus merasakan dinginnya jeruji besi tanpa tahu apa kesalahannya. Bahkan, berbagai tuduhan yang dilayangkan padanya kalau dia adalah salah satu simpatisan PKI, tidak benar. Mirisnya, ketidakadilan harus terus ia rasakan sampai hari ini. Kejelasan penyelesaian kasusnya menggantung, hak-hak yang seharusnya ia terima pun tak kunjung dipenuhi oleh negara.

maria cornelia kuryati sanu

Orang-orang kerap menyapanya Oma Sanu. Oma adalah salah satu dari orang tua korban Tragedi Kerusakan Mei 1998. Anaknya, Stevanus Sarintus Ontonius Sanu (Vanus) menjadi korban pembakaran Mal Yogya Klender (kini dikenal dengan Mal Citra Klender). Mirisnya, jasad Vanus tidak ditemukan sampai hari ini. Di usianya yang sudah lanjut dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih, tidak menyurutkan semangat Oma Sanu untuk terus menuntut pertanggungjawaban negara atas tragedi yang menimpa anak dan keluarganya.

Oma Sanu yang lahir pada 29 November 1982 ini terkenal sebagai pecinta tumbuhan. Beliau senang menanam dan merawat berbagai tumbuhan, terutama tumbuhan obat-obatan. Beliau amat sangat antusias jika diajak berbincang mengenai tumbuhan yang ia tanam didepan rumahnya. Oma Sanu tidak hanya aktif dalam dunia pergerakan, seperti Aksi Kamisan, tetapi juga berbagai kegiatan sosial dilingkungan rumahnya, oleh sebab itu, beliau menjadi salah seorang perempuan yang turut disegani.



Pak Amir merupakan salah seorang korban dari Tragedi Talangsari 1989. Sebelumnya, ia adalah mantan guru agama Islam dari salah satu sekolah dasar negeri di Lampung Timur yang diberhentikan secara tidak adil. Ia dituduh terlibat dalam gerakan pengacau keamanan kala itu. Meskipun sudah lama berhenti menjadi guru, tetapi rasa hangat selalu menyelimuti dirinya, ia selalu bisa mengayomi dan memberikan kenyamanan terhadap orang-orang baru yang ia temui.

Tahun ini beliau memasuki usia ke 75 tahun. Bapak yang gemar menggunakan peci ini lahir di Klaten pada 29 November 1945. Selama ini, ia gemar menulis puisi yang menceritakan berbagai pengalaman hidupnya, baik senang maupun sedih, mulai dari kisah intim tentang keluarga sampai dengan kisah menegangkan yang harus ia rasakan karena kekejaman rezim Orde Baru. Sayangnya, kisah pilu Pak Amir tidak berhenti seraya tumbang rezim Orde Baru. Sampai hari ini, Pak Amir hidup dalam keadaan dibawah garis ekonomi. Lebih dari 31 tahun, kasusnya tidak diutus tuntas, pelaku tidak juga diadili bahkan hak-hak Pak Amir sebagai korbanpun tidak juga dipenuhi oleh negara.



amir



greta thunberg

& anak SMA di Indonesia

Pasti sering banget kan kalian dihadapkan dengan perkataan oleh orang-orang tua seperti "Ya elah, anak sekolah masih bau matahari aja ngapain ikutan demo" atau "ngapain sih anak sekolah ikutan demo, seragamnya entar kotor, udah sekolah aja yang bener". Tapi pernah ngga sih kita berfikir kalau mungkin anak-anak muda, remaja bahkan anak SD yang sudah memiliki nalar dapat menilai dengan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya, atau yang lebih luasnya lagi yakni tentang situasi negara yang amburadul.

Di Indonesia, tahun 2019 kemarin banyak anak STM dan SMA ditangkap, bahkan beberapa diantaranya mendapatkan hukuman penjara selama beberapa bulan. Kejem banget dunia. Masa mengutarakan pendapat dan berkumpul ada Batasan umurnya? Padahal semakin dini seseorang menyadari dan peka akan situasi di sekitarnya semakin bagus kan? Berbanding terbalik dengan kampanyenya Jokowi yang sering banget datang ke konser-konser kekinian macam Synchronize Fest, Metallica dan bergaya ala anak muda dengan menggunakan sneakers kekinian, bikin vlog dan pergi ke tempat-tempat hits dimana tujuannya adalah menggaet suara anak-anak muda. Karena populasi usia produktif di Indonesia menurut survei Alvara Research pada 2016, penduduk usia 15-34 tahun mencapai 34,45 persen dari total populasi dan akan terus bertambah dalam tahun-tahun mendatang. Data ini dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki 125,44 juta angkatan kerja produktif. Besarnya angka demografis tersebut menunjukkan posisi Generasi Milenial sebagai satu kekuatan sentral dalam konteks politik, terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Apabila disandingkan dengan pilpres 2014, jumlah ini hampir mendekati jumlah suara sah, yaitu 133 juta suara. Hitungan ini belum termasuk jumlah pemilih pemula pada pemilu 2019.

Nah tapi, ternyata ketika anak muda yang sebenarnya menjadi target kampanye politik tidak boleh menyampaikan pendapatnya dan mengkritik situasi rezim! Ruang geraknya dibatasi, diintimidasi, dipukuli aparat dan lain sebagainya seperti yang terjadi pasca aksi #ReformasiDikorupsi bahkan beberapa ada juga yang meninggal. Pertanyaannya: Apakah anak muda Cuma jadi aksesoris politik pemerintah aja untuk menaikkan popularitasnya? Tapi lo pade tetep diem ye. Udah ikutin aja cara main gue. Gitu ibaratnya.

Di Indonesia, kita udah banyak ngeliat fenomena pembatasan kebebasan berkumpul khususnya pengkerdilan gerakan anak muda itu. Kita melancong ke Swedia, ada seorang anak muda yang masih berusia 17 tahun, Namanya Greta Thunberg. Pasti udah ngga asing kan sama namanya. Greta adalah seorang aktivis lingkungan dalam isu perubahan iklim yang kampanyenya jadi viral tapi bukan buat jadi bahan perundungan netizen dan target operasi polisi. Namun, video-videonya yang mencuat di dunia digital justru diapresiasi oleh banyak pihak, karena di usianya yang masih sangat muda, Greta sudah dianggap sebagai aktor penting dalam isu keadilan sosial.

Pertama kali Greta memulai kampanyenya bahkan ke orang tuanya sendiri untuk menerapkan beberapa gaya hidup untuk mengurangi emisi karbon. Dia juga yang menginisiasi gerakan mogok sekolah untuk pergi ke Parlemen Swedia untuk menagih langkah dari pemerintah Swedia dalam rangka menyikapi perubahan iklim yang dinamakan School Strike for the Climate (Mogok Sekolah demi Iklim).

Greta udah jadi bagian dalam beberapa pidato di forum internasional di PBB dan disaksikan oleh ratusan pejabat negara. Pendapatnya didengar, bahkan dia pun engga dimarahin karena dia mogokk sekolah demi sebuah perubahan. Karena tujuan mogok sekolahnya ya memang jelas, untuk isu keadilan sosial dan lingkungan yang lebih baik.

Greta bahkan dinobati sebagai "next generation leader" versi majalah Time dan menjadikan dia sebagai panutan gerakan anak muda. Dan dia pun mendapatkan beasiswa untuk sekolahnya oleh pemerintah Swedia yakni "Royal Scottish Geographical Society" dan sebagai salah satu dari 100 "The most influential people" versi majalah Time dan dia yang paling muda di jajaran itu!

Gerakan Greta tidak lalu dianggap sebagai catatan buruk negara, namun dianggap sebagai pembelajaran dan anak-anak muda yang kritis dinobatkan sebagai orang yang dapat menjadi generasi penerus yang seringkali dilemparkan kepada anak-anak muda oleh pejabat negara, walaupun pada kenyataannya sebaliknya. Dampak yang diberikan oleh Greta bahkan mendapatkan julukan sebagai "Greta Effect" karena dampak yang diberikan oleh keteguhan dan kritiknya terhadap pejabat negara untuk menuntut aksi terkait permasalahan iklim. Kira-kira, kalau di Indonesia bisa ngga ya salah satu anak muda dianggap secara harfiah sebagai pembawa perubahan atas kritik-kritiknya untuk negara yang lebih baik, misal sampai punya julukan juga seperti Greta yaitu, "STM Effect"?

Antara Hong Kong dan Indonesia,

INA

Kisah Pergerakan Anak Muda di Hong Kong dan Indonesia.



香港

Di Hong Kong,

Polisi melakukan pengepungan dan membredel beberapa kampus dan menangkap mahasiswa yang terlibat dalam aksi. Polisi pun mengungkapkan bahwa siapapun yang mengikuti demonstrasi pro-demokrasi akan dipenjara paling lama 10 tahun.

Lebih dari 900 anak di bawah umur telah ditangkap pada aksi pro-demokrasi yang dilakukan di Hong Kong. Kurang lebih terdapat 5,980 mahasiswa dan pelajar ditangkap dan 267 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ada yang baru berumur 11 tahun.

Polisi meningkatkan penggunaan kekuatan - termasuk lebih dari 16.000 tabung gas air mata, water cannon, 10.000 peluru karet dan peluru tajam - dan penolakan pihak berwenang untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi mendorong mereka untuk mengambil bagian dalam protes yang lebih keras terhadap pemerintah.

Di Indonesia,

Polisi melakukan pengepungan ke kampus Atma Jaya dan beberapa kampus lainnya tanpa menggunakan seragam dan menangkap mahasiswa yang ada di dalam kampus. Selain itu polisi pun melakukan penangkapan di beberapa restoran dan tempat umum lainnya ketika polisi melihat ada mahasiswa yang membawa al-mamater.

Polisi menangkap 1.489 orang dalam demo bertajuk '**Reformasi Dikorupsi**' menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah dalam periode aksi 24-30 September. Dari ribuan itu, 380 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Saat unjuk rasa dilakukan, Kepolisian juga melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan seperti tiba-tiba melontarkan gas air mata ke kerumunan massa tanpa alasan sah. Bahkan gas air mata dilontarkan ke kampus Atma Jaya yang menjadi tempat evakuasi korban yang mendapatkan perawatan medis. Polisi menghalangi massa pengunjung rasa untuk mendekat ke Gedung DPR/MPR, padahal di situlah aspirasi hendak disampaikan.

HK

ID

1. Poh, gimana pendapat lo soal seni menjadi medium untuk melawan? Dalam konteks hari ini apakah masih relevan?

Kalo menurut gua masih. Medium lewat karya masih relevan. Apapun mediumnya ketika itu untuk menyampaikan sesuatu, buat gua itu masih relevan. Yang bisu bisa bikin visual yang buta bisa bikin suara, maksud gue keterbatasan-keterbatasan itu banyak solusinya untuk kita menyampaikan sesuatu, apalagi ke pemerintah, banyak cara lah.

2. Sebagai muralis atau seniman, pernah ga sih proses berkarya the Popoh dihalangi oleh pihak berwenang?

Jangankan bikin langsung ya untuk mural, justru di medium seperti Instagram justru ada penolakan. Beberapa kali akun gue kena suspend gara-gara posting foto Munir, Novel Baswedan, Amin Rais. Postingan-postingan itu sering ilang dan akun gue sering ke suspend, kalo secara offline masyarakat banyak kompromi, dan banyak bantu. Dulu kalau lagi mural ada satpol PP atau polisi yang menghalangi ya tak terhitung jumlahnya.

3. Popoh pernah kerjasama dengan KontraS untuk ngelelang karya the Popoh untuk para korban pelHAM, apa yang mendorong the Popo untuk melakukan itu?

Suara gua terbatas, apalagi untuk ngadepin orang-orang yang bilang 'Ayo bikin lagi poh, gue ngarepin elu bikin karya yang menyuarakan hal-hal yang gitu. Karna lu banyak followersnya, power lu besar.' Menurut gue setiap orang kan punya kesempatan yang sama, kenapa lu nungguin gua, kalo gue selalu dtungguin kekuatan gue terbatas, walau gitu gue tetep jalan dengan keterbatasan gue, sakit kalo gue diem aja ketika melihat HAM yang dilanggar. Dalam berjuang gue juga dibantu sama KontraS atau sama kalangan yang punya kekuatan yang sama.

4. Komentar the Popoh tentang anak muda dan HAM saat ini apa?

Emang harus anak muda yang menyuarakan harus ada regenerasi ga harus nunggu-nungguan lah apa yang ingin disuarakan tentang HAM ya suarakan. Ketika salah, yang tua bisa benerin, yang berpengalaman bisa bimbing yang muda. Menurut gua itu movement yang bagus ya ketika anak muda sadar akan HAM.

5. Lo ngeliat gak perubahan yang mungkin terjadi dengan anak muda dulu dengan anak muda hari ini dari segi kritisme? Apakah perubahan itu salah satunya dipengaruhi oleh media sosial?

Media online dan offline punya kekuatan masing-masing. Online lebih mudah diakses dan lebih mudah direspon tanpa harus datang ke tempat kejadian perkara. Jadi buat gua kalo emang baru bisa online untuk menyuarakan silahkan, kalo udah bisa turun ke jalan itu lebih bagus. Gua juga ga bisa selalu turun ke jalan, tapi gua percaya kalo sebenarnya gue ga sendiri banyak orang-orang yg ada suara tapi belum percaya sama suaranya sendiri jadi buat gue anak-anak muda itu kekuatannya lebih entah apapun yang mereka punya online maupun offline, terserah yang penting menyuarakan.

bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham

#BicaraHAM

The Popoh, Muralis



6. Di tiap lini hidup kita, selalu berkaitan sama sisi politik. Kita ga bisa terhindar dari itu, lo dengan mural juga kadang suka membuat karya sebagai medium kritik sosial, tapi ada saja alasan sebagian seniman yang enggan untuk terlibat dalam perjuangan, menurut lo apa kendalanya? Apakah emang murni pilihan, atau ada brand imej yang harus dijaga?

Pilihan itu kembali lagi ke individu seniman itu sendiri. Kalau dia mau ada di wilayah yang adem-adem aja silahkan, atau yang pingin turun ke jalan tapi juga mau tetep adem-adem silahkan, ada juga seniman yang turun ke jalan ya silahkan, tapi buat gue memang harus dari kesadaran individu masing-masing. Gua dikelilingi sama orang-orang yang kesadarannya lebih besar dan itu berpengaruh ke gue, salah satunya temen-temen di KontraS ketika gue bikin dan posting dan temen-temen kontras nyamperin gue untuk meneruskan karya gue, wah itu gue lebih seneng. Intinya pilihan pasti ada, bebas-bebas aja tapi gue juga ga mau memaksakan pilihan orang lain, terserah pada jalurnya, gue sendiri memilih ketika melihat sesuatu gue lebih sakit kalo gue diem dan gue perlu dibantu tentunya dalam perjuangan.

7. Dari karya-karya yang lo buat, mana sih yang paling berkesan buat lo tentang kritik sosial?

Salah satunya yang gue bikin buat KontraS yang buat Munir terus Wiji Tukul dan lainnya. Gue ga kenal secara individu dengan tokoh-tokoh itu, pengetahuan gue juga dari temen-temen dan lingkungan, dan kerjasama seperti itu yang gue butuhkan. Buat gue emang harus bareng biar kekuatannya lebihb dan akan lebih berkesan kalau diteruskan, dalam arti orang lain membutuhkan untuk memperjuangkan juga yang mereka perlukan dari temen-temen kamisan atau KontraS dan sebagainya.

8. Lo ada rencana gak melakukan kolaborasi atau pembuatan karya lo yang menggambarkan situasi nasional hari ini?

Gue emang sekarang lagi jarang buat posting di media social tapi yang gua bikin di jalan masih tetap berlanjut. Tapi kadang orang nungguinnya di social media jadi keliatannya gue kurang. Padahal ritmenya sama, terkadang orang-orang yang nunggu di Instagram kadang kurang peduli juga sih sama media offline yang langsung di ruang publik. Gue lebih suka medium yang kayak aksi kamisan dan temen-temen KontraS yang bisa merespon karya gue kembali. Gue akan menyempatkan diri gue sesibuk apapun sesempit apapun waktunya, apalagi kalau waktu luang gue akan lebih maksimal untuk bekerjasama dengan teman-teman KontraS dan teman-teman yang punya movement.

9. Lo mandang pemerintahan hari ini gimana?

Dari pemerintah ke pemerintah sebenarnya penyakitnya sama aja. Ada yang ngebetulin mental yang sebenarnya mental mereka juga sakit. Masing-masing individu, kelompok yang statusnya masyarakat itu bahan bakar pemerintah untuk bekerja, entah kita bertikai, entah kita bercerai, entah kita saling dengki, itu bahan bakar mereka sebenarnya. Jadi gue masih gelap sih sama harapan-harapan pemerintah yang dari tahun ke tahun, masa ke masa penyakitnya sama aja. Gue lebih percaya sama kesadaran individu atau kelompok yang dibangun dengan kepercayaan mereka masing-masing tanpa dasar rasa dengki.

10. Situasi nasional hari ini perlu banget keterlibatan anak muda dalam berbagai sektor. Terutama memperjuangkan hak-hak mereka yang rentan terenggut. Gimana pandangan lo?

Ada temen gue yang harus masuk ke pemerintahan untuk memperjuangkan hak yang dulu mereka perjuangkan, pada akhirnya ketika mereka masuk, mereka ada di zona nyaman, mereka lupa dengan apa yang mereka perjuangkan. Tapi kalau mereka punya kesadaran untuk bergerak menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan terhadap pemerintah buat gue itu masih sama kuatnya (di luar sedikit banyak followers mereka), porsinya sama buat gue sekali lagi, jangan saling tunggu-tungguan atau dorong-dorongan, lu kan influencer followersnya banyak gue nunggu pergerakan lu, maksudnya banyak medium yang bisa lu ikutin dan lu bantu. KontraS pun tanpa anak-anak muda ini ga akan jadi apa-apa cuman sekedar organisasi pembe-la HAM atau anak-anak muda ini juga kalo cuman nunggu KontraS ya sama aja, jadi buat gue inisiatif dan langsung gerak itu penting dan saling mengingatkan biar jalurnya itu tetep.





#BicaraHAM

Baskara Putra,
Musisi

bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham

1. Bas, gimana pendapat lo soal seni menjadi medium untuk melawan? Dalam konteks hari ini apakah masih relevan?

Gue sering banget dapet kritikan dari luar, katanya lirik-lirik gue banyak mengkritik aja, tapi gak ngasih solusi. Menurut gue seni itu tanda tanya, mungkin ya salah satu fungsinya adalah menekankan lagi hal-hal yang belum terjawab, atau memang masih dicari jawabannya. Kalau penggiat kesenian harus ngasih solusi, lalu pemangku kebijakan ngapain? hahaha. Dalam konteks sosial politik, mungkin tanda tanya ini sifatnya menjadi sebuah perlawanan, ya. Menurut gue masih relevan, tiap generasi pasti ada aja yang dikeluh-kesahkan, selama mereka mendapatkan karya-karya tertentu yang mereka rasa bisa ngewakilin narasi zamannya sih harusnya relevan terus ya.

2. Sebagai seniman, pernah ga sih proses berkarya lo "ketahan" gara2 lo kepikiran takut dipidana atau kecaman dari pihak lain?

Awal-awal iya. Sekarang sih udah gak 'takut' ya, tapi masih selalu was-was aja. Abisan kalau kita lihat dari kasus-kasus beberapa momen ke belakang ini, tampaknya orang-orang tertentu bisa selalu pidanain lo kalau mereka emang gak suka.

3. Komentar lo tentang anak muda dan HAM saat ini apa? apakah mereka cenderung menjauh dari isu ini?

Menurut gue sih nggak ya, tapi mungkin karena makin kesini pilihan 'aktivitas' anak muda itu makin banyak, kesannya kerisauan mereka terhadap berbagai kasus HAM ini jadi tenggelam aja, karena di tengah-tengah dunia modern yang semuanya serba cepat, informasi dan suara lo juga mudah tenggelam di tengah-tengah konten-konten yang lain. Itu, dan mungkin harus diakui kalau banyak upaya-upaya untuk menyuarakan berbagai isu HAM sekarang udah gak cocok dengan anak-anak muda. Mungkin cara-cara banyak yang usang.

4. Lo ngeliat gak perubahan yang mungkin terjadi dengan anak muda dulu dengan anak muda hari ini dari segi kritisme? Apakah perubahan itu salah satunya dipengaruhi oleh media sosial?

Gue sempat ngobrolin topik yang nyerempet ini dengan salah satu temen gue, dan gue setuju saat dia bilang dua pemilu terakhir ini tiba-tiba ngebikin generasi yang langsung 'melek politik', walau lagi-lagi standar kritisme dan 'melek' ini juga subjektif dan gak ada standar pastinya. Yang pasti sekarang media sosial memudahkan tiap orang untuk bersuara. Ibarat jaman dulu kalau lo mau didenger maka lo dan temen-temenlo harus bakar ban di tengah jalan protokol, sekarang lo cukup menyuarakan sesuatu dengan baik dan terstruktur di Twitter dan kadang-kadang tweet lo bisa bener-bener bikin perubahan, kecil maupun besar. Cuman harus diinget kalau ngepost dan ngetweet bukan berarti bersuara/beropini, dan punya akun media sosial bukan berarti lo pintar. Yang nyampah di internet juga banyak.

5. Lo percaya/yakin gak kumpul mahasiswa pas september 2019 lalu kejadian lagi di waktu yang akan datang? kan ada mahasiswa yang digebukin, bahkan tewas. apa yang membuat mereka berkumpul kira2?

Satu hal yang menurut gue ngebikin rangkaian aksi di bulan September 2019 kemarin itu masif banget adalah karena permasalahannya dikomunikasikan dengan SANGAT JELAS ke masyarakat. Jadi semua lapisan merasa bahwa isu ini adalah isu mereka juga, menyangkut kelangsungan hidup mereka juga, dan dampaknya langsung ke mereka. Jadi semua orang (gak cuma mahasiswa) merasa punya musuh bersama. Gue percaya bahwa sebenarnya semua masalah sosial politik itu pasti punya dampak ke semua orang, pasti. Tapi sayangnya gak selalu bisa disampaikan dengan baik--mungkin cara penyampaiannya terlalu kaku, terlalu meromantisme cara-cara lama, atau terlalu kompleks aja buat dimengerti orang-orang sehari-hari. Dengan kejadian September 2019 kemarin dan insiden-insiden yang terjadi karena itu, gue yakin kalau besok-besok ada isu yang bisa dikomunikasikan sebaik kemarin lagi, pergerakannya akan lebih masif, dari segi mahasiswa maupun kelompok masyarakat manapun yang lain.

6. Di tiap lini hidup kita, selalu berkaitan sama sisi politik. Kita ga bisa terhindar dari itu, lo dengan lagu-lagu menjadikan itu sebagai medium kritik sosial, tapi ada saja alasan sebagian seniman yang enggan untuk terlibat dalam perjuangan, menurut lo apa kendalanya? Apakah emang murni pilihan, atau ada brand imej yang harus dijaga?

Menurut gue keduanya. Gue kenal langsung dengan beberapa seniman yang sebenarnya punya stance politik yang sangat jelas dan tegas, tapi memang secara pilihan gak mau mencampurkan karya seninya dengan politik. Yang memang agak malu-malu bersuara karena takut mencederai citra publik mereka--entah secara personal atau hubungan mereka dengan berbagai korporasi yang mereka jaga--biasanya memang gak sebegitu politisnya di kehidupan sehari-hari.

7. Dari karya-karya yang lo buat, mana sih yang paling berkesan buat lo ttg kritik sosial?

Peradaban itu lagu yang aneh banget. Pas pertama kali ditulis, kami [-Feast] memang merencanakan Ia untuk dirilis sebagai single, tapi gak sama sekali mikir bahwa Ia akan meledak; pertama karena intronya panjang, dan lagunya repetitif/monoton. Murni pandangan politis kami aja. Tapi ternyata gampang dipick up sama banyak orang, dan sekarang lagu ini udah dikoploin, dijadiin lagu dangdut, diputer di club buat nemenin orang-orang mabok tiap malem, tapi juga dipake untuk jadi lagu march saat orang-orang turun ke jalan. Peradaban adalah lagu yang bikin gue yakin bahwa lagu bermuatan politis justru semakin bagus kalau bisa jadi sesuatu yang gak eksklusif dan bisa masuk ke ranah-ranah lain sehari-hari, karena gue percaya bahwa pergerakan gak boleh eksklusif dan elitis, harus mencakup semua kelompok.

bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham

8. Lo ada rencana gak melakukan kolaborasi atau pembuatan karya lo yang menggambarkan situasi nasional hari ini?

Sepertinya semua karya-karya gue bersama kawan-kawan di .Feast memang selalu jadi refleksi situasi masyarakat terkini aja, walau skala dan fokusnya beda-beda; ada yang tentang lingkungan, ada yang lingkupnya kecil hanya seputar kelompok, ada yang ngomongin negara dan sistem juga. Gue cuma berharap gue dan kawan-kawan bisa selalu jejak sama tanah terus dan hatinya gak pernah tumpul biar gak berhenti ngomongin hal yang memang perlu diomongin.

9. Jika lo seorang presiden, hal apa yang ingin lo benahi sebagai kepala negara?

Yang pasti kasus-kasus pelanggaran HAM dahulu, dari yang terdahulu dan belum kelar-klar sampai sekarang sampai yang terbaru. Gue percaya kalau masyarakat harus belajar dari masa lalu agar besok-besok gak terjebak lagi dengan kesalahan yang sama. Buat gue, gak usah jauh-jauh ngomongin perkembangan, apalagi seni, kalau yang paling fundamental macam pelanggaran HAM aja belum selesai. Logika prioritasnya jadi loncat-loncat aja, menurut gue.



1. Gal, gimana pendapat lo soal seni menjadi medium untuk melawan? Dalam konteks hari ini apakah masih relevan?

Budaya Jawa, kesenian lahir untuk melawan penguasa dengan caranya; mau itu Sisingaan, Jaranan, Reog Ponorogo, Berokan, bahkan Mocopatan yang berisi wejangan ketidakpuasan pada raja. Kesenian tradisional ini lahir dari orang-orang melawan dan siap kalah. Perlawanan lahir dari ketidakadilan pemimpinnya. Dalam seni tradisi, rakyat sebagai orang yang kalah dalam narasi sejarah yang selalu berpihak pada kaum priyayi. Namun rakyat juga menang, dalam praktik kesenian.

Kalau kekalahan ini dilakukan ratusan tahun oleh anak-cucu, ya memang melawan berarti seni sesungguhnya. Seni memang lahir untuk melawan apapun, minimalnya... melawan kekerasan dalam relasi berpacaran deh. Kalau kita tarik hari ini, relevan dong. Media bukan dari langgam saja yang ditutur seniman lokal ratusan tahun lalu, namun melalui hal yang populer seperti lagu dan film. Semua orang bisa belajar melawan dari wacana kesenian.

2. Sebagai seniman, pernah ga sih proses berkarya lo "ketahan" gara2 lo kepikiran takut dipidana atau kecaman dari pihak lain?

Ngga sih. Bikin mah bikin aja. Lha wong gue ngerasain kok bagaimana kejanggalan RUU ini merugikan manusia Indonesia, selain elit. Jadi ya kita tau yang kita lawan sebenarnya siapa sih?

3. Komentar lo tentang anak muda dan HAM saat ini apa? apakah mereka cenderung menjauh dari isu ini?

Ngga menjauh. Kesadaran untuk setara, melakukan penyetaraan dan berkolaborasi untuk membahas, mempelajari dan memahami hal mendasar dilakukan kok. Di media sosial, di perbincangan santai. Ya perlu sering-sering membahas: Kekerasan dalam berelasi dan bagaimana negosiasi dan kesepakatan dilanggar. Itu sudah bentuk mempelajari hak azasi paling dasar.

Atau juga bagaimana anak muda hari ini dalam berkomunitas atau berkolektif. Lalu berhadapan dengan elitis yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan mereka yang mana cara kerjanya tidak adil dalam berkolaborasi. Yang elit melanggar kesepakatan misalnya, bertindak otoriter dan eksklusif. Ya mereka kan punya kuasa. Kalau paham ya, ini toh segala bentuk pemaksaan ya melanggar hak.

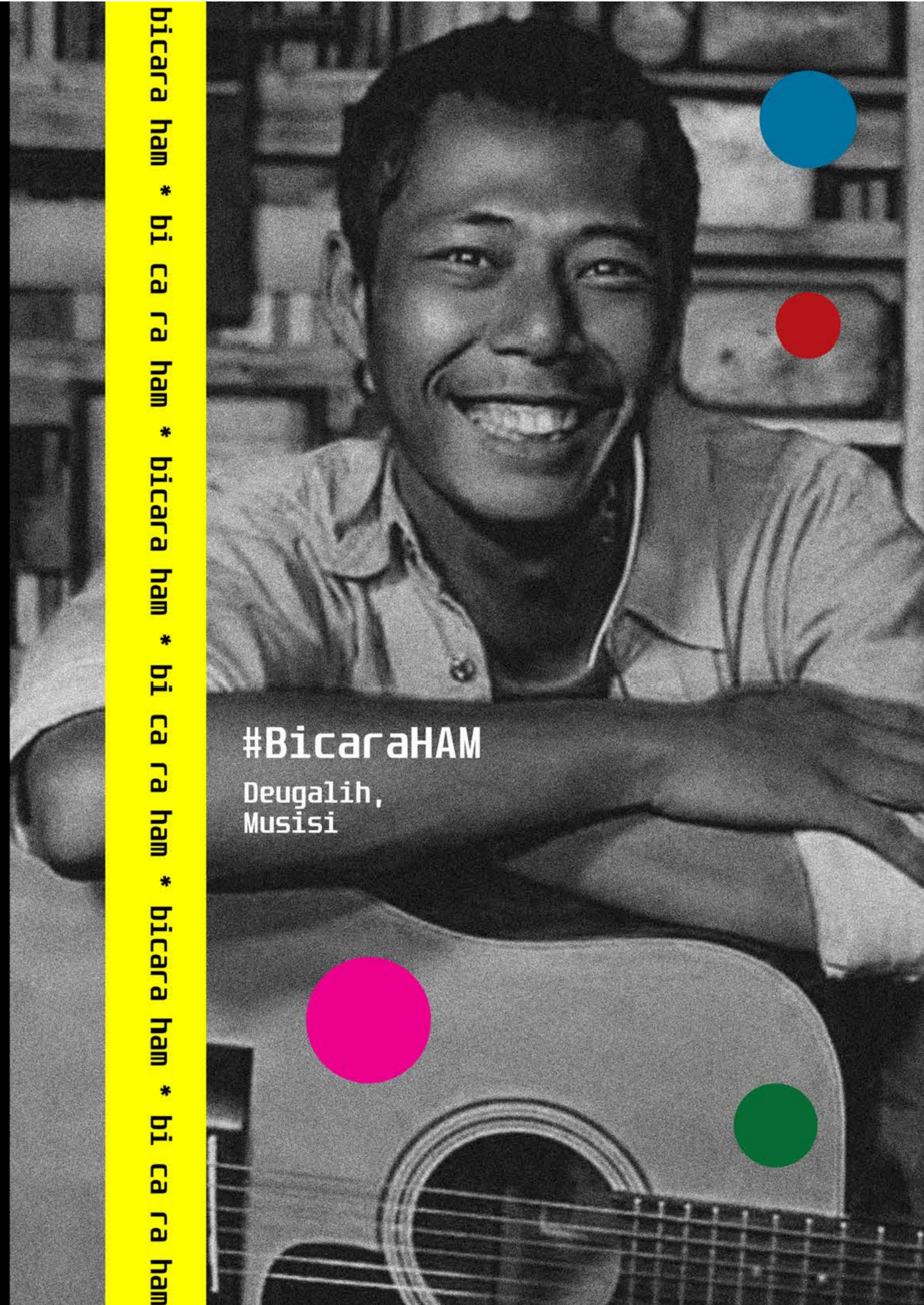
4. Lo ngeliat gak perubahan yang mungkin terjadi dengan anak muda dulu dengan anak muda hari ini dari segi kritisme? Apakah perubahan itu salah satunya dipengaruhi oleh media sosial?

Media sosial? Tidak cukup. Karena media sosial membuat orang menyetujui apa yang dia percaya saja. Itu gak belajar namanya. Pertemuan dengan beragam kalangan yang dilakukan anak muda dengan berkolektif yang jadi tren, nah ini yang perlu jadi cermin dan penanda zaman. Trend is okay, sebab visinya jelas.

bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham

#BicaraHAM

Deugalih,
Muisi



5. lo percaya/yakin gak kumpul mahasiswa pas september 2019 lalu kejadian lagi di waktu yang akan datang? kan ada mahasiswa yang digebukin, bahkan tewas. apa yang membuat mereka berkumpul kira2?

Apa aja bisa terjadi ya saat ini. Selama pejabatnya bersikukuh membuat Undang-Undang dengan pasal karet. Dalam kaidah hukum saja, salah dan melanggar. Karena bahasa hukum tidak boleh ambigu, harus jelas. Keadilan kok ambigu? Kalau masih begitu kriminalisasi hingga pembunuhan aktivis ya bisa kapan saja terjadi.

6. Di tiap lini hidup kita, selalu berkaitan sama sisi politik. Kita ga bisa terhindar dari itu, lo dengan lagu-lagu menjadikan itu sebagai medium kritik sosial, tapi ada saja alasan sebagian seniman yang enggan untuk terlibat dalam perjuangan, menurut lo apa kendalanya?

Apakah emang murni pilihan, atau ada brand imej yang harus dijaga?

Terlibat itu gimana ya?

Ya mungkin bisanya hanya sampai fan-service. Gak salah juga. Tujuannya gimana? Ada juga sih musisi yang baru belajar dan turun ke jalan pas albumnya rampung. Dia baru ngeh kalo ngomong doang itu basi.

Turun ke jalan minimal bikin perpustakaan, ya disebut turun juga. Gimana aja cara termudah berbagi sebisa lu. Kalo seniman jualan perlawanan. Wajib dikritik dan semua seniman memang perlu dikritik. Jurnalisme musik atau seni hari ini dipegang anak muda, musisi tua dan jurnalistid musik lawas itu banyak distorsinya, mereka gak bisa mengkritisi leluasa, mereka memegang dan mengurus band. Ada kepentingan dan relasi kuasa di dalamnya. Saat ini, sudah lebih baik.

Era zine baik cetak dan digital juga sedang jaya hingga kota-kota kecil membicarakan persoalan kota & desa. Pun diinisiasi musisi yang tak peduli dia terkenal atau tidak, yang penting isu dan wacana sekitarnya. Bukankah hari ini menyenangkan?

Yang kurang menyenangkan mungkin kota besar, masih dirajai orang-orang lama. Dangdut membuktikan bahwa ia mampu menyokong kota dan makin dewasa tema musiknya. Mereka juga memanfaatkan fan-service dengan baik, bukan cuma lip-service di media sosial sih.

Dangdut pun kebanyakan hadir bukan dari kota anak emas, seperti Jakarta-Bandung-Jogja. Ya kupikir kota besar justru perlu banyak belajar bagaimana musik bisa jadi media perlawanan melalui hal remeh seperti yang dibicarakan dangdut. Dangdut itu solid, solider; musisinya nyanyi semua nyanyi, musisinya gerak fansnya gerak.

bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham * bicara ham * bi ca ra ham

7. Dari karya-karya yang lo buat, mana sih yang paling berkesan buat lo ttg kritik sosial?

Tentang adiksi, fetish, abusive. Di sana dasarnya kekerasan tho?

Gak melulu perlawanan itu ngomongin orang, ngomongin diri dan bagaimana manusia menjadi adiksi pada sesuatu hal hingga abusive adalah berkat peristiwa yang membuat mental manusianya hancur. Negara ini punya tanggung jawab besar dengan persoalan psikologis manusia saat ini.

8. Lo ada rencana gak melakukan kolaborasi atau pembuatan karya lo yang menggambarkan situasi nasional hari ini?

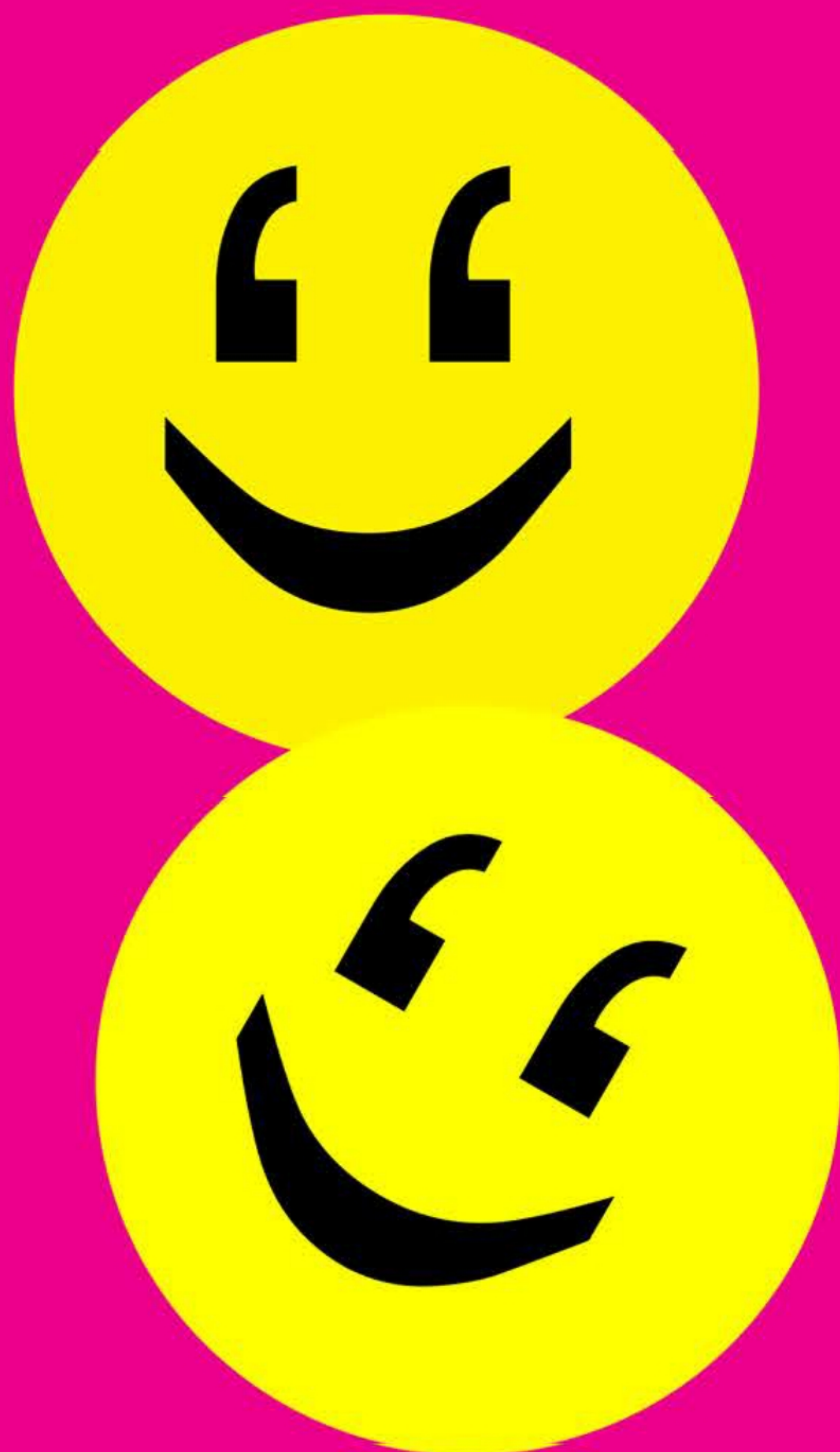
Akan. Tahun ini sedang bikin band yang gak melulu isinya laki-laki dan menaruh perempuan sebagai bemper jualan musik. Pokoknya adil deh. Amin.

9. Jika lo seorang presiden, apa yang lo minta kepada anak muda?

Gak akan jadi presiden sih.

Kalo maksa, boleh deh. Gue bilang ke anak muda, "Kalau bisa punya cita-cita itu ya apa aja boleh. Tapi yang nomor 1, mengkritik presiden itu sepatutnya jadi hobi semua orang. Kalo presiden bagus kerjanya, gak usah dipuji, lha wong orang politik kok dipuji? Kalau jelek, ya protes. Itu hak lu untuk dilayani dengan manusiawi oleh presiden lu.





pojok
hiburan

12 ANGRY MEN

(1957)

DALAM FILM KLASIK YANG SEBAGIAN BESAR FILMNYA BERLANGSUNG DALAM SATU SET INI, SIDNEY LUMET BERHASIL MENGHADIRKAN SEBUAH DRAMA PERSIDANGAN PENUH INTRIK DI PERMUKAAN, NAMUN APABILA DITELISIK LEBIH DALAM MENGANDUNG TANTANGAN KEPADA PENONTON UNTUK MEMPERTANYAKAN HARGA SEBUAH NYAWA DALAM SUDUT Pandang SISTEM HUKUM YANG KAKU DAN BIAS.

DALAM FILM INI, SEORANG TERDAKWA SEDANG DIADILI ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN TERHADAP AYAHNYA SENDIRI. BERBAGAI BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN SEAKAN MEMASTIKAN BAHWA IA MEMANG BERSALAH ATAS PEMBUNUHAN TERSEBUT. HAL INI DITUNJUKAN DENGAN 11 DARI 12 JURI DALAM PERSIDANGAN DALAM WAKTU CEPAT LANGSUNG MEMUTUSKAN BAHWA SI TERDAKWA BERSALAH ATAS TUDUHAN TERHADAPNYA.



APABILA KE- DUA BELAS JURI SECARA BULAT MENYATAKAN BERSALAH, MAKA SI TERDAKWA AKAN DIJATUHI HUKUMAN MATI. NAMUN, PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG AWALNYA TAMPAK AKAN BERAKHIR DENGAN CEPAT, TERNYATA TIDAK DEMIKIAN DENGAN ADANYA SATU ORANG JURI YANG MEMPERTANYAKAN KEMBALI SETIAP BUKTI DAN FAKTA YANG ADA DENGAN MOTIVASI YANG SAYA RASA CUKUP SEDERHANA: HUKUM TIDAK SEHARUSNYA MENGAMBIL NYAWA SESEORANG DENGAN BEGITU MUDAHNYA.

pojok
hiburan

“BETTER THAT TEN GUILTY PERSONS ESCAPE THAN THAT ONE INNOCENT SUFFER”

**Tersangka
Disiksa dan
Dipaksa
Mengaku
Membunuh
Pengamen di
Cipulir -
Kompas.com**

JAKARTA,
KOMPAS.com —

WILLIAM BLACKSTONE

“

wajah fasis tersebut bernama pemerintah

Sebagai komik shounen tentang petualangan sekelompok bajak laut remaja, One Piece tanpa disangka-sangka merupakan alegori terhadap fenomena yang terjadi setiap saat di dunia nyata seperti rasisme, diskriminasi, perbudakan, dan pemerintahan otoriter yang keseluruhannya diantitesiskan dalam satu fenomena dalam berbagai tingkatan: pemberontakan. Dunia dalam One Piece digambarkan berada di bawah sebuah entitas super power dengan kewenangan nyaris tidak terbatas bernama World Government.

Dalam menjalankan kewenangannya, berbagai pelanggaran hak-hak dasar manusia turut dilakukan seperti penculikan paksa, perbudakan, sampai genosida. Pembunuhan massal terhadap sekelompok arkeolog yang berusaha mengungkap sejarah kejahatan World Government di masa lalu, misalnya, sampai batasan-batasan tertentu tampak seperti mencerminkan sikap pemerintah Indonesia terhadap upaya-upaya pelurusan sejarah pembantaian massal oleh negara terhadap anggota Partai Komunis Indonesia serta siapapun yang dicap sebagai simpatisannya pada tahun 1965-1966.



Proses sensor ketat terhadap narasi lama yang dalam serial one piece disembunyikan dalam pahatan batu seperti mencerminkan keadaan riil di Indonesia dalam bentuk razia dan pelarangan buku2 kiri. Apabila anarki dalam one piece sebagai antitesa terhadap wajah pemerintahan yang otoriter diwujudkan dalam ide bajak laut, maka dalam konteks dunia nyata, aksi protes di jalan melawan kesewenang-wenangan negara bisa jadi merupakan cerminan atas fenomena yang sama.

jangan bakar buku

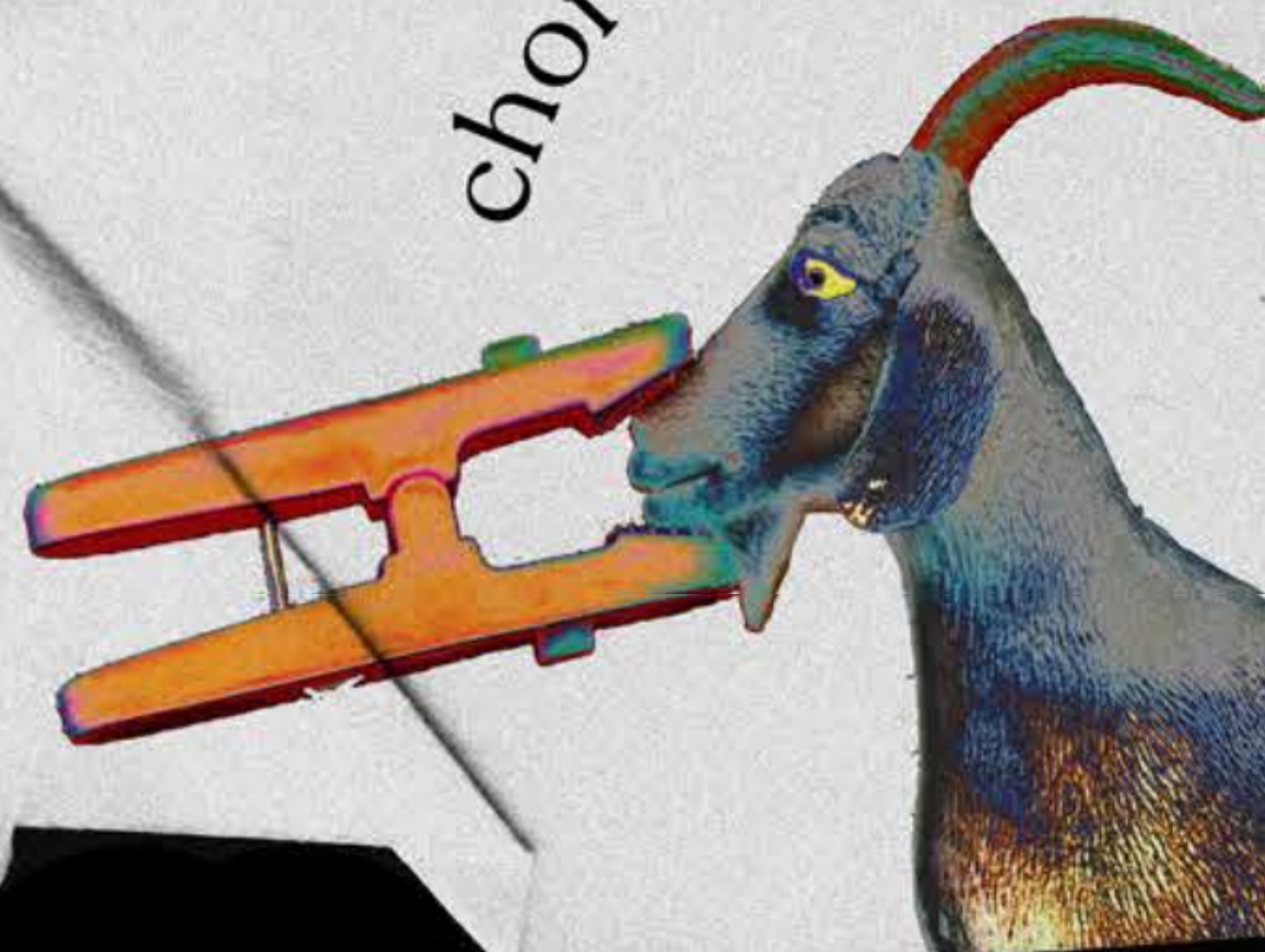
efek rumah kaca

Intro] A C#m A C#m
F#
karena setiap lembarnya
F#
mengalir berjuta cahaya
C#m C#m
a.. aa.. a.. aa..
F#
karena setiap aksara
F#
membuka jendela dunia
C#m C#m
a.. aa.. a.. aa..

[Chorus]
D#m Em F#m G
kata demi kata mengan-
tarkan fantasi
AmG F#m
habis sudah.. habis
sudah..
D#m Em F#m G
bait demi bait pemicu
anestesi
AmG F#m
hangus sudah.. hangus
sudah..
F#
karena setiap abunya
F#
membangkitkan dendam
yang reda
C#m C#m
a.. aa.. a.. aa..
F#
karena setiap dendamnya
F#
menumbuhkan hasutan
baka
C#m C#m
a.. aa.. a.. aa..

[Chorus]
D#m Em F#m G
kata demi kata mengan-
tarkan fantasi
AmG F#m
habis sudah.. habis
sudah..
D#m Em F#m G
bait demi bait pemicu
anestesi
AmG F#m
hangus sudah.. hangus
sudah..
[Interlude] F#m Gm F#m
A# Cm A# Am (6x)
[Chorus]
D#m Em F#m G
kata demi kata mengan-
tarkan fantasi
AmG F#m
habis sudah.. habis
sudah..
D#m Em F#m G
bait demi bait pemicu
anestesi
Am G
hangus sudah..

chord musik



Buku adalah jendela dunia, buku adalah sumber ilmu pengetahuan, membaca adalah senjata yang paling kuat.

Ya mungkin itu kata-kata yang dulu sering kita dengar, apakah sekarang kata-kata itu masih berlaku? dikala acara tv lebih menggoda dibanding sebuah buku, atau memang kita sudah tidak diperbolehkan membaca buku sesuai keinginan kita?

Mungkin lagu yang dirilis oleh band Efek rumah kaca ini cocok untuk mengartikan kegelisahan kita disaat sebuah keinginan untuk membaca buku pun dibatasi, juga dengan keinginan kita mencari informasi.

Bagaimana bisa, lagu yang dirilis hampir 1 dekade lebih ini masih relevan dengan kondisi saat ini. buku-buku dibatasi, diskusidi halangi, bersuara di persekusi. apakah ini penyebab minimnya minat baca di indonesia? atau dikarenakan membaca suatu buku yang "beda" akan merubah pandangan orang kepada kita? bukan buku atau membacanya yang salah, tetapi apa yang dipikirkan orang lain lah bahaya sesungguhnya.

Dilihat dari namanya, mungkin kita membayangkan suasana tiga pagi (jam), sunyi, tenang, maupun mencekam, ya tergantung dari interpretasi kalian seperti apa, tapi disini kita tidak akan membahas asal muasal nama tigapagi itu, melainkan kita akan membahas salah satu lagunya yang menjadi track pertama di album "Roekmana's repertoire" berjudul Alang-alang.

Bagi kalian yang pernah mendengarkannya, lagu ini merupakan salah satu lagu Tigapagi yang sangat kental dengan alunan musik sunda, dengan pembawaan muram era 1960an, mungkin itu alasannya lagu ini pun dikeluarkan bertepatan dengan peristiwa G30SPKI yang terjadi pada tahun 1965 silam.

Lagu yang dibawakan oleh Rookie of the year majalah Rolling Stone di tahun 2014 ini bila kita telaah sangat erat kaitannya dengan peristiwa penculikan paksa sepanjang tahun 1997-1998, lagu ini dapat mewakili perasaan ibu maupun keluarga 13 korban penculikan paksa, lagu yang dapat membawa kita merasakan bagaimana perasaan keluarga korban penculikan yang hingga kini pun tidak tahu menahu keberadaan anak maupun keluarganya.

Ya, hingga kini kita tidak tahu dimana mereka (petrus, herman, suyat, wiji, yani, sonny, dedi, noval, ucok, hendra, yadin, dan abdun) berada. Kami tidak lupa, kami akan terus mengingat dan memperjuangkan keberadaan kalian.

alang - alang tigapagi

Intro]
G Em Am G
[Verse 1]
G Em

Hangus terbakar rindu
Am G
masa lalu dududuuuu
G Em
Menanti waktu berpacu tak menentu
Am G
Ku berdebu, oh berdebu

Em Am G
[Verse 2]
G Em

Hanya terpaku suaraku pun
bersewu
Am G
Cuma pilu! Cuma pilu!



TIGAPAGI

[Chorus 2]

Am Em Bm F#m
Anakku hilang tak kembali
Am Em Bm F#m
Anakku hilang tak kembali
Am Em Bm F#m
Anakku yang hilang tak kembali
Am Em Bm F#m
Anakku yang hilang tak kembali

[Instrumental]
FCD Bm C D
Bm C F

Chorus 1]

Am Em Bm F#m
Anganku hilang tak kembali
[Anganku hilang tak kembali]
Am Em Bm F#m
Anganku hilang tak kembali
[Anganku hilang tak kembali]
Am Em G
Anganku yang hilang tak kem-
bali

[Chorus 3]

Dm Am Em Bm Anakku hilang tak kembali
[Anakku yang hilang tak kembali]
Dm Am Em Bm
Anakku hilang tak kembali [Anakku yang
hilang tak kembali]
Dm Am Em Bm
Anakku yang hilang tak kembali [Anakku
yang hilang tak kembali]
Dm Am Em Bm
Anakku yang hilang tak kembali [Anakku
yang hilang tak kembali]
Dm Am Em Bm
Aaaaaa..... Aaaaaa.....
Dm Am Em Bm
Aaaaaa..... Aaaaaa.....



pisces

Pisces, sebagai zodiak dengan unsur watersign ini, kerap merupakan pribadi yang mengedepankan perasaan dibanding logika. Seringkali mereka yang berzodiak Pisces ini dihadapkan dengan ingin melakukan segala sesuatu dengan baik tapi sulit karena harus mendengarkan kata hati. Sialnya, zodiak ini mudah percaya akan janji-janji yang diberi oleh orang lain dan cukup sensitif, mudah marah tanpa alasan serta cukup keras dalam hal pekerjaan. Kalau kamu berhadapan dengan Pisces dan tidak menghargai pekerjaannya, jangan berharap ia akan mengerjakan tugasnya dengan baik, yah.

Salah satu pejabat pemerintah yang berzodiak Pisces ini adalah Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Bapak Ma'ruf Amin, hemmm kebayang gak ya selama menjabat bersama Pak Jokowi dengan zodiak Cancer 4 tahun ke depan kira-kira sesensitif apa ya? Apa iya mereka mengedepankan perasaan dalam pekerjaan? Bisa jadi bahaya sih kalo pekerjaan dibalut dengan perasaan, apalagi perasaan gaenak ke investor.

Horoskop

Dikenal sebagai zodiak dengan unsur firesign bersama-sama dengan Sagittarius dan Leo, Aries dikenal dengan sifatnya yang menonjol yaitu mau menang sendiri. Apalagi dalam hal kerjaan pun perdebatan, pokoknya mau menang sendiri! Kalau urusan cinta, Aries cukup bodoh ya dalam hal PDKT, seringkali bingung maunya apa dan harus gimana ke doi. Sifat lain yang ga kalah nonjol, orang-orang berzodiak Aries ini kerap kali suka mencari perhatian dan juga sombong akan dirinya, sisi baik dari Aries adalah memang sifatnya yang pemberani dan ga takut ambil risiko!

Menariknya dari zodiak ini, salah satu sosok ternama di negeri, Bpk. Wiranto ternyata berzodiak Aries. Gak salah sih sering ada namanya dalam pemberitaan-pemberitaan, khususnya Oktober lalu yang cukup menarik perhatian. Tapi pak, kan pemberani, berani ambil risiko, berani juga dong bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu!



aries

taurus

Earthsign dikenal sebagai zodiak yang lebih mengedepankan logika dibanding perasaan, berbeda dengan kawan-kawan watersign. Taurus ini, sosok yang cukup tenang dan dingin at the same time, namun akan sangat defensif ketika diserang, memang karena dia punya sifat keras kepala dan merasa benar akan ucapannya. Unikny dari Taurus, ia punya sense ketika ada kebohongan disekitarnya, jadi ya hati-hati aja kalau bohong sama si Taurus. Sifat lainnya, Taurus ini cukup bisa diandalkan dengan pikirannya yang rasional, tetapi sifat keras kepala dan gak sabarannya kadang bikin sebel orang sekitar!



Mahfud MD, yang ternyata berzodiak Taurus ini yang belakangan terlihat sangat defensif dengan pernyataan-pernyataannya soal "dokumen data tapol Makar Papua adalah kumpulan nama tidak jelas" dan menyebutkan sebelumnya bahwa data dari Tim Veronica Koman adalah sampah, apakah terus mau defensif Pak? Defensif tapi hebatnya dia tetap bisa tenang dan dingin sih seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Keren.



Gemini, dikenal sekali sebagai zodiak yang ganjen, muka dua dan sweet-talker banget! Masuk dalam elemen airtsign, seringkali Gemini ini cenderung plin-plan dan gak tau maunya apa. Pun, memang gemini itu fleksibel banget dan mudah beradaptasi sama orang-orang baru, tapi kadang sarkasnya itu suka ganahan! Sifat lain yang terlihat dari gemini adalah, dia gak toleran dengan orang-orang yang terlalu kritis, malahan gak ngelakuin apa-apa tapi cuma bisa mengeluh aja, seringkali mengeluhkan hal yang sama berulang kali.

Nah, Menteri Hukum dan HAM kita satu ini, gak kaget sih kalau zodiak dia ternyata Gemini. Terlihat dari bagaimana ia dari Menteri, pindah ke DPR, pindah lagi ke Kementrian, hadeeeh, maunya apa sih? Beberapa statement-nya yang membingungkan ketika ditanya soal masalah-masalah *ReformasiDikorupsi juga keliatan kan ngomongnya entah kemana dan keliatan raut wajahnya yang hanya mengeluhkan masalah aja tanpa adanya solusi dari belio.

gemini

Aroma

Resep Sop Iga Kesukaan Alm. Wawan

Resep oleh: Ibu Sumarsih



Bahan

1 kg buntut / Iga sapi
2 liter Air
Wortel
Kentang
Daun Bawang
Tomat
Jeruk Limo
Emping

Bumbu

4 batang sere
10 lembar daun jeruk
2 biji pala, dibelah 2 memanjang
5 cm jahe, digeprek
1 ons bawang merah
2 sendok makan lada bulat
10 siung bawang putih
1 sendok makan lada
10 siung bawang putih

Sambel

10 cabe rawit merah:
direbus & diuleg bersama sedikit garam.

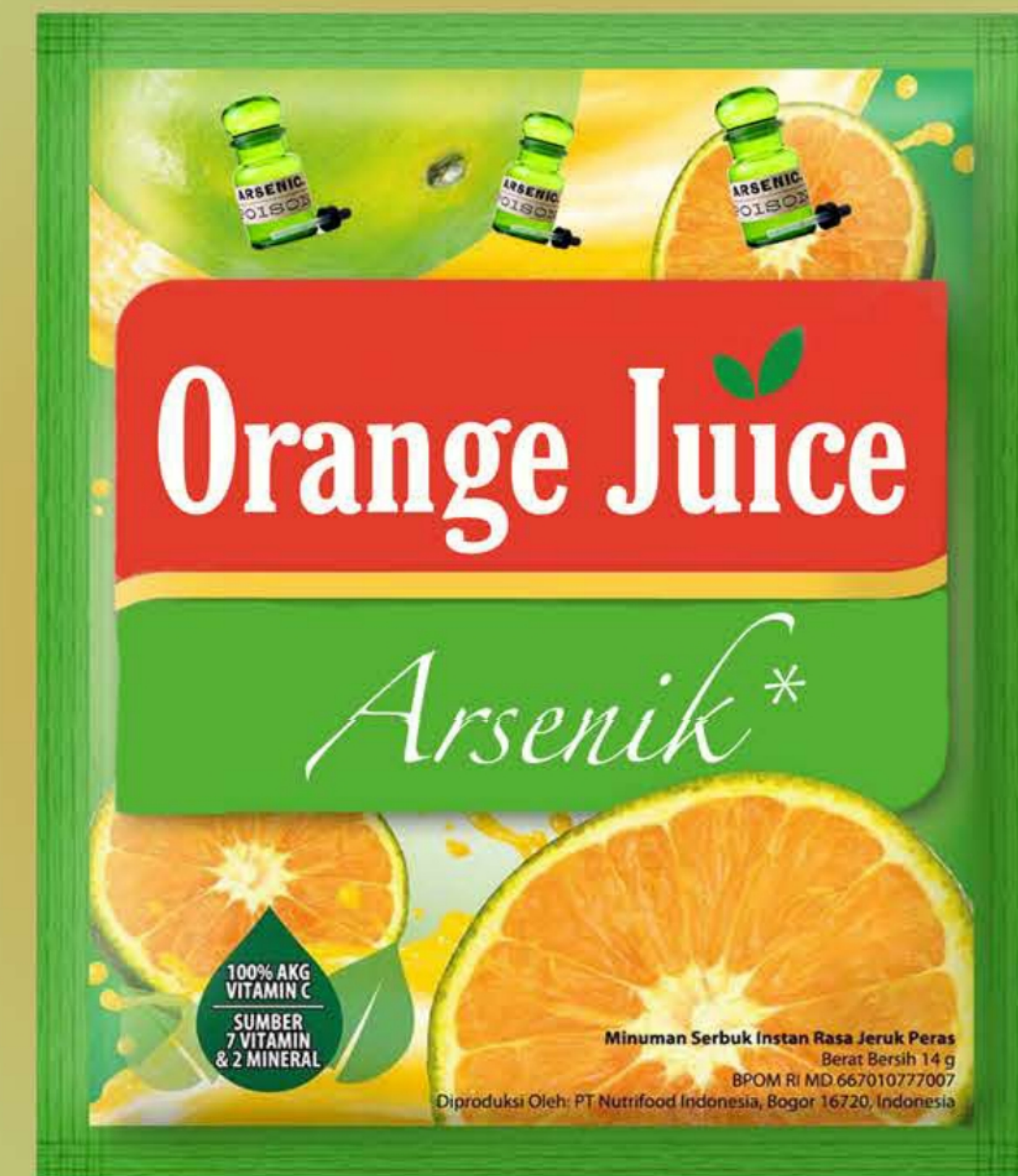
Cara Membuat:

1. Presto iga sapi, sere, daun jeruk, garam dan air selama 30 menit
2. Kalau sudah dingin, masukkan ke dalam kulkas supaya lemaknya mengeras
3. Buang lemak, daun sere dan jeruk
4. Haluskan lada dan bawang putih lalu masukkan ke dalam rebusan iga bersama biji pala dan jahe
5. Kalau sudah akan diangkat, masukkan tomat yang sudah dipotong sesuai selera
6. Kukus wortel dan kentang, dipotong sesuai selera
7. Daun bawang dirajang sesuai selera
8. Iris tipis bawang merah, beri 1 sendok teh air dan sedikit garam, lalu digoreng.

Pollycarpus' Signature Drink

Minuman ini adalah minuman “spesial” yang dipersembahkan khusus oleh Pollycarpus kepada Munir Said Thalib pada penerbangannya menuju Belanda.

Polly belajar meracik ramuan spesial jus jeruk ini dari koleganya di Badan Intelijen Negara seperti Muchdi PR dan A.M. Hendropriyono.



Komposisi:

3 buah jeruk Sunkist
1 gelas air
1 sendok gula
1 botol arsenic
(kira-kira 10 ml)

Panduan:

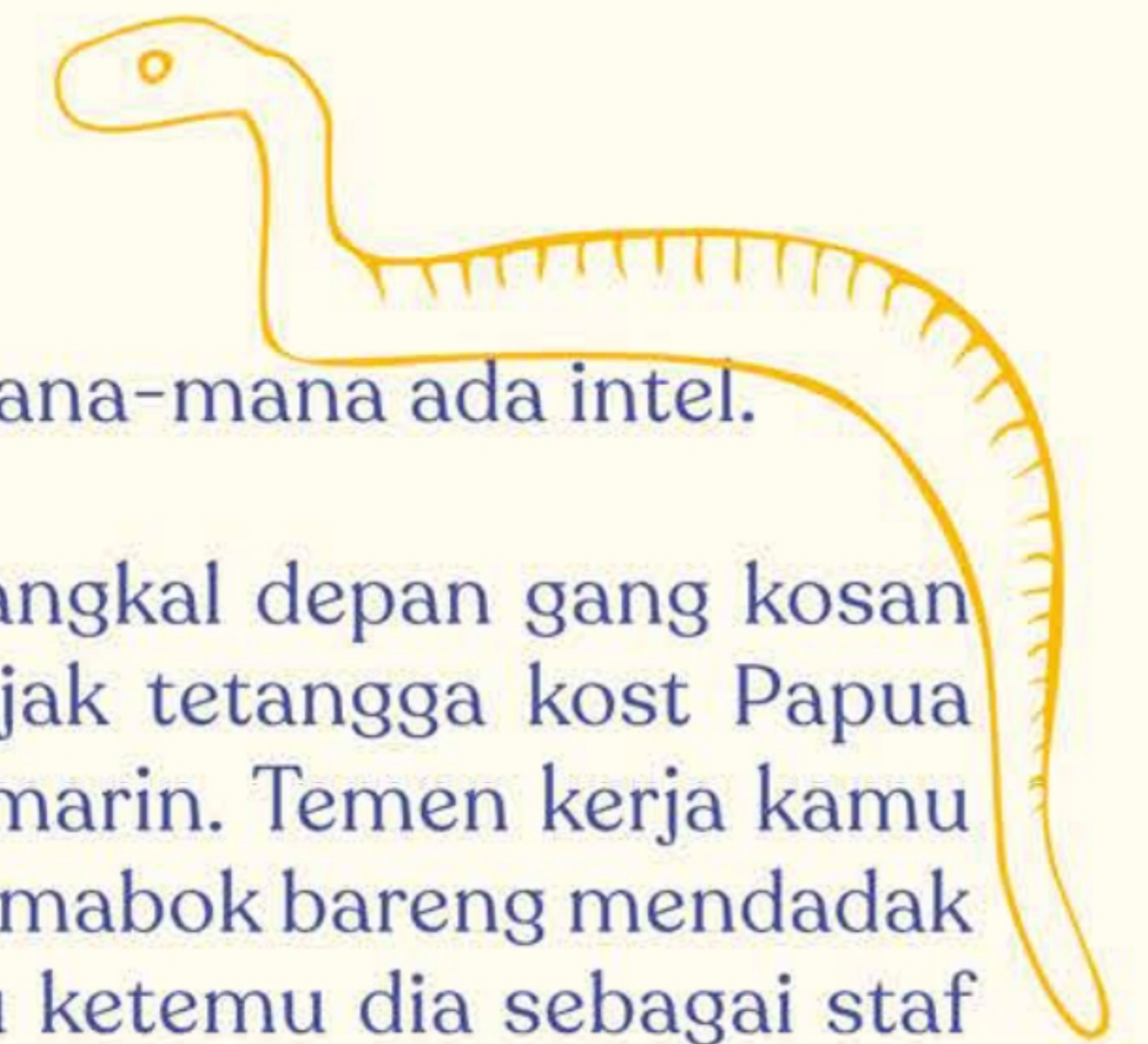
1. Campurkan semua bahan hingga larut.
2. Sajikan dan tunggu hingga orang itu meminumnya
3. Perhatikan reaksi arseniknya di udara hingga ia tiada.

Khasiat

Minuman ini niscaya akan menghilangkan orang-orang yang kerap kali menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia, sehingga negara dapat bebas dari kritik dan dugaan pelanggaran HAM.

*Catatan: Resep ini adalah bentuk sarkasme dari lambatnya sikap negara terhadap kasus pembunuhan Munir Said Thalib di atas pesawat Garuda Indonesia menuju Belanda, dimana sesuai dengan dokumen TPF Pembunuhan Munir dikatakan bahwa aktor intelektual di balik pembunuhan Munir dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang hingga saat ini dokumennya tak kunjung dipublikasikan kepada masyarakat dengan alasan dokumennya hilang. Haduh, dokumen aja bisa hilang, apalagi manusia dan kemanusiaan ya?

Tempat Nongkrong Anti Intel



Intel ada di mana-mana, di mana-mana ada intel.

Tukang nasi goreng yang biasa mangkal depan gang kosan kamu tiba-tiba berhenti jualan sejak tetangga kost Papua kamu “diamankan” 1 Desember kemarin. Temen kerja kamu yang udah dua tahun haha hihi dan mabok bareng mendadak resign, dan secara kebetulan kamu ketemu dia sebagai staf Kemenkumham.

Kamu pernah menyayangkan temen kamu yang pintar memilih drop out dari jurusan Filsafatnya. Lalu, di saat kalian secara tak sengaja ketemu di bakmi Roxy, dia cerita kalau sebenarnya dia drop out, tapi pindah kampus. Bukannya bergelar Sarjana Filsafat (S.Fil.) seperti cita-cita awal, dia justru punya gelar yang bikin kamu ternganga, Sarjana Intelejen (S.In.). Kamu mendadak resah, ape iye bisa temenan lagi kayak dulu atau mundur cantik demi keamanan?

Dengan adanya intel Melayu kemana pun kamu pergi, pasti ada saatnya butuh safe zone yang bebas dari segala dunia perintelan. Nah, kita mau rekomendasiin 5 tempat hits bebas intel yang patut kamu sambangi untuk sekedar Namaste.

Bagaimanapun, kaum prekariat kayak kita perlu hidup lebih selo supaya masih punya nafas panjang lawan rezim yang serba ga jelas ini.

Berikut daftar tempat hits bebas intel yang siapa tau bisa jadi konten Instastory kamu

perpusnas



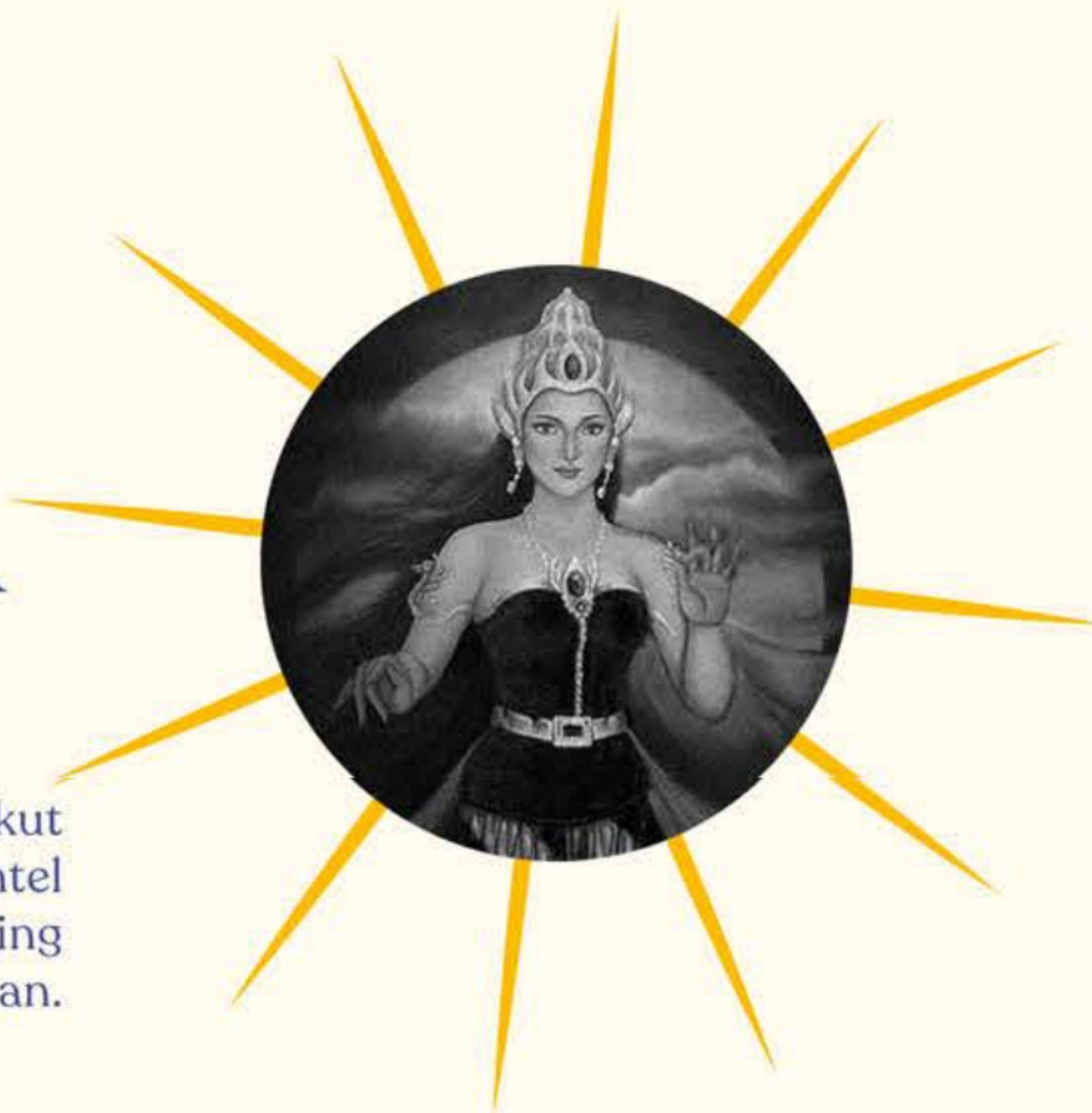
Intel suka banget sama buku. Bukan buat dibaca, tapi buat dirazia dan dibakar. Ya kalau mereka suka baca buku, ga bakalan mau jadi polisi mungkin. Maraknya razia dan bakar buku oleh para intel, militer maupun kepolisian ini mengentalkan kecurigaan bahwa sepertinya lembaga itu punya fetish khusus yang berhubungan sama asap buku yang dibakar.

Bisa jadi, asap dari buku yang dibakar itu bisa bikin jadi giting. Mirip proses bakar-bakar ganja di depan Polsek yang bisa bikin giting orang sekampung.

Perpusnas bisa bebas intel karena mereka emang cuma punya buku-buku yang udah disetujui rezim sehingga mustahil bagi para intel memuaskan fetish bakar buku mereka.

Jadi, kalau mau ngadem, baca buku dengan tenang bebas intel, atau sekedar numpang kerja kayak di coworking space, yuk ke Perpusnas aja.

laut selatan



Keseraman hijau loreng-loreng berikut dengan wajah sok sangar para intel Melayu akan kalah seram dibanding angin sepoi-sepoi di Laut Selatan. Berani sama Ratu Kidul kamu? Ha?

istiqlal



Ademnya masjid Istiqlal bekas pijakan kaki Kyai Ma'ruf Amin akan membuat intel yang awalnya ngebuntutin kamu milih untuk rebahan di lantainya.

Dijamin!

family mart



Intel tidak tersedia di Family Mart karena mereka cuma jual Pop Mie dan mie cup lain pesaingnya. Bagaimanapun, intel terbaik ada di warung-warung burjo kesayangan anak kost sekitar. Percayalah, Indomie telur burjo emang ga pernah salah dalam melengkapi kenikmatan hakiki, terutama di musim hujan yang dingin.

Selain di burjo, kamu juga bisa menikmati intel spesial bikinan ibu Atik di kantin KontraS.

Apple store menyediakan semua PC dan laptop tanpa prosesor intel. Segala macam Macintosh adalah awal mula kebebasan hidup tanpa prosesor intel. Jika tertarik, jangan hubungi Kodim sekitar.



apple store

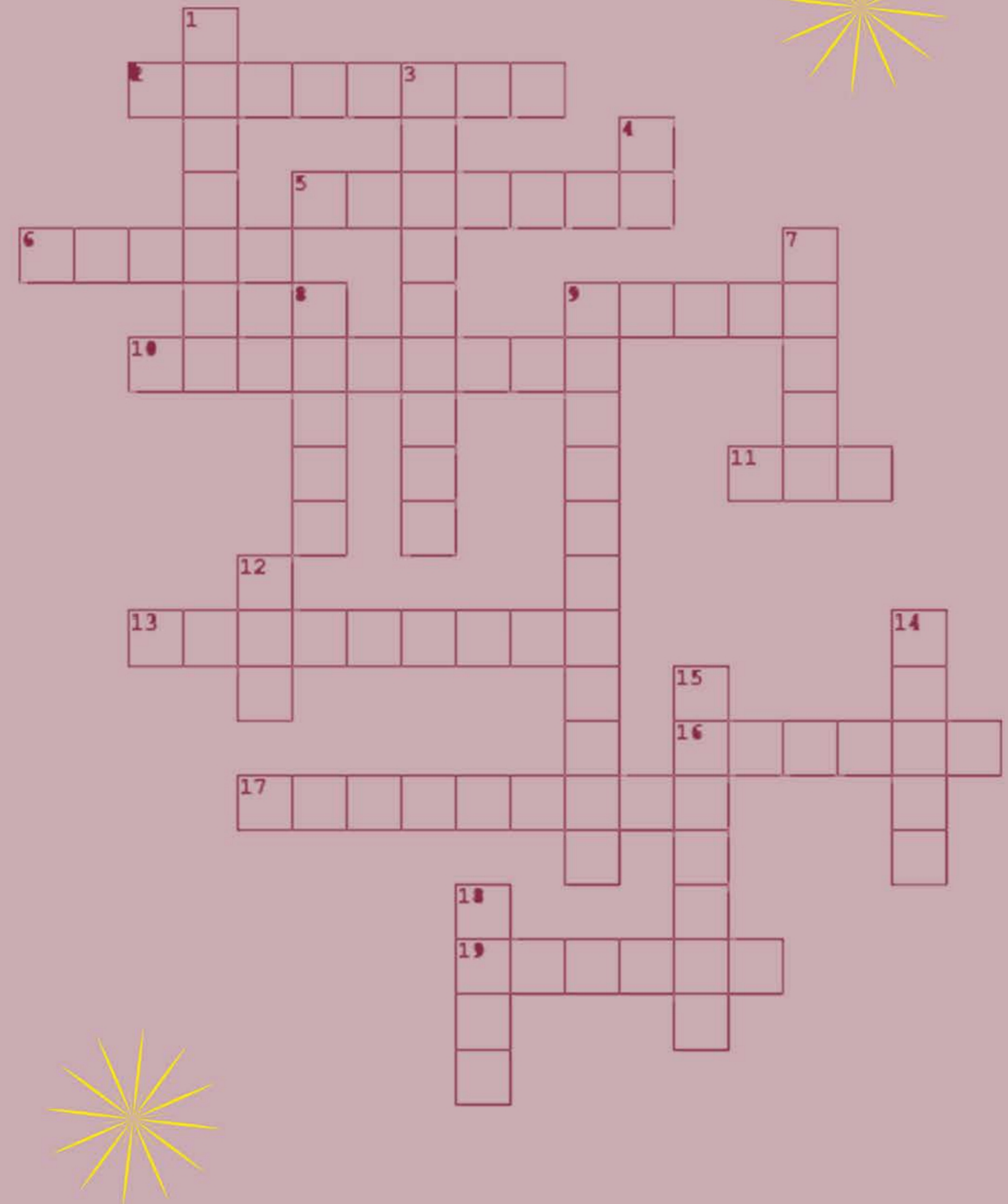
Teka-Teki HAM

mendatar

2. Masa pemerintahan Soeharto
5. Aksi diam di depan istana
6. Pengadilan untuk proses pelanggaran ham
9. Provinsi di Indonesia yang melarang jurnalis asing
10. Ideologi yang ditakuti pemerintah
11. UU pasal karet yang bikin senewen netizen
13. Kekebalan hukum untuk pelaku kejahatan berat
16. Wilayah Papua yang jadi lokasi pelanggaran HAM masa lalu
17. Gerakan mahasiswa tahun 1998
19. Musuh demokrasi, biasanya digunakan rezim untuk proyek pencitraan di media sosial

menurun

1. Pelanggar HAM, lawan Jokowi di pilpres
3. Kelompok Islam yang masjidnya sering ditutup kaum intoleran
4. Perserikatan bangsa-bangsa
7. Tanaman tidak baik yang perkebunannya sering bikin masalah tapi dicintai negara
8. Pembawa bendera yang dipenjara saat #ReformasiDikorupsi
9. Pengusiran paksa rumah warga
12. Lembaga yang dilemahkan Jokowi
14. Tokoh HAM yang dibunuh BIN
15. Media sosial tempat sobat miskin sambat
18. Militer Indonesia sebelum TNI



pojok kontras

Apakah kontras baru bekerja setelah situasi terjadi?

Tidak selalu harus menunggu situasi terjadi. Karena dalam kerja-kerja advokasi yang kami lakukan menggunakan beberapa pendekatan dan cara, di antaranya melalui advokasi dalam bentuk litigasi, non litigasi, Investigasi, monitoring, kampanye.

Untuk advokasi kasus-kasus baik melalui litigasi dan non litigasi biasanya memang dilakukan setelah peristiwa atau kasus terjadi. Karena dalam melakukan advokasi (pembelesaian) kasus harus berdasarkan pada peristiwa yang terjadi. Begitu juga untuk investigasi atau Fact Finding, biasanya merujuk dulu pada dugaan peristiwa yang terjadi.

Sementara itu, untuk advokasi kebijakan, tidak harus menunggu situasi terjadi. Dalam advokasi kebijakan karena dalam advokasi kebijakan, kita berupaya mempengaruhi, mengintervensi agar negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dan memenuhi parameter HAM dan demokrasi. Termasuk memberikan koreksi dengan berbagai upaya apabila kebijakan yang dirumuskan atau dibuat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

Begitu juga, untuk monitoring atau pemantauan, kerja ini tidak harus menunggu situasi terjadi. Kami memiliki assessment dan analisa isu-isu strategis yang berdampak pada pemenuhan HAM dan demokrasi. Dari pemetaan isu-isu tersebut tersebut, kami melakukan pemantauan secara rutin.

Dalam hal kampanye, kami memberikan informasi, melakukan ajakan kepada publik dan juga memfasilitasi masyarakat untuk memahami dan terlibat dalam gerakan advokasi dan kampanye HAM. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan baik offline maupun online dan juga sebisa mungkin berkenaan dengan isu-isu HAM dan demokrasi yang kontekstual dan relevan dengan kerja KontraS. Dalam melakukan kampanye ini tentu kami tidak harus menunggu situasi/peristiwa/kasus terjadi.

Apakah kontras selalu benci pemerintah?

Kerja-kerja KontraS ditujukan untuk mendorong pemerintah melakukan pemajuan, perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM. Dimana hal-hal tersebut merupakan kewajiban negara yang direpresentasikan oleh otoritas pemerintah, agar pemerintah/negara dapat memenuhi, menjalankan kewajibannya tersebut sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi. Oleh karenanya, apapun yang KontraS lakukan, justru tujuannya karena KontraS mencintai negara ini. Mencintai negara itu kan bisa dengan berbagaidanbanyak-cara,tidaktunggalcaranya.Nah,apayangKontraSlakukan dalam kerja-kerjanya adalah untuk memperkuat negara dan masyarakat dalam isu isu HAM dandemokrasi merupakan bagian dari rasa cinta terhadap negara, bukan sebaliknya sebagai sebuah kebencian.

Apa kontras tidak bosan berjuang terus?

Ini bukan soal bosan atau tidak bosan. Selama kekerasan, pelanggaran HAM, ketidakadilan dan ancaman terhadap demokrasi dan HAM terjadi, maka upaya-upaya untuk menghentikan, mengoreksi, membela (advokasi) masalah ini akan terus berjalan. Karena di situlah mandat KontraS dan dengan cara itulah mekanisme atau kondisi check and balance antara pemerintah dan masyarakat sipil terjadi. Dalam hal ini demokrasi dan HAM mensyaratkan adanya kondisi oposisi yang kuat, kontrol, pengawasan yang kuat dari luar pemerintah, termasuk dari masyarakat sipil. Dalam konteks dan tujuan itulah KontraS menjadi relevan untuk terus berjuang.

Apa nilai Munir yang masih membudaya hingga hari ini di kontras?

Nilai Munir yang mana yang dimaksud?

Barangkali tepatnya, nilai – nilai organisasi. Nilai nilai organisasi adalah penghormatan hak asasi manusia. Nilai-nilai itu menjadi fondasi organisasi dalam melakukan kerja-kerja advokasi dan menjalankan organisasi

Orang2 kontras ini digaji gak sih? Apa hanya kerja sukarela?

Ya, menerima gaji. Namun juga ada kerja-kerja sukarelawan

Apakah badan pekerja kontras sering mendapat ancaman?

Ancaman itu ada dan terjadi, khususnya di pada masa-masa awal setelah transisi politik terjadi (2000-2004). Level dan bentuknya ancaman beragam. Munir dibunuh jelas adalah serangan yang tersutruktur dan sistematis. Sebelumnya, kantor KontraS juga beberapa kali diserang oleh paramiliter. Upaya-upaya kriminalisasi juga terjadi pada Badan Pekerja KontraS, atau ancaman via sms, telpon atau ancaman dan intimidasi saat berada di lapangan. Juga serangan dan cibiran via melalui media sosial

Bagaimana cara kontras menerima pembukaan pegawai?

Dengan membuka informasi perekrutan dan melakukan seleksi terhadap volunteer KontraS untuk menjadi volunteer program atau staff KontraS jika dibutuhkan.

Bagaimana melawan rasa takut?

Takut merupakan hal yang manusiawi. Namun, ketika kita memiliki perspektif, memegang nilai dan prinsip yang teguh pada nilai-nilai HAM dan kemanusiaan, dan terbiasa dalam menghadapi tantangan, masalah di berbagai level, terutama di lapangan. Termasuk tidak "berjarak" dengan masalah yang muncul di masyarakat, di akar rumput, maka kita akan lebih terbiasa melawan rasa takut, karena nurani dan keberpihakan kita menjadi lebih peka.

Hal penting lainnya adalah, ketika kita yakin apa yang kita lakukan ada nilai dan tujuan yang kita perjuangkan, termasuk setidaknya adanya keyakinan bawah apa yang kita lakukan akan memberikan kontribusi pada kebaikan dan perubahan, maka rasa takut kita disadari atau tidak akan "mengalah"dengan sendirinya.

Apa yang membuat kontras terus ada?

Adanya harapan, desakan, tuntutan, partisipasi, kontribusi dan kerjasama dari banyak elemen dan pihak, termasuk diantaranya para korban, keluarga korban, jaringan masyarakat sipil dan masyarakat untuk terus menyuarakan pemenuhan, penegakan HAM dan demokrasi.